



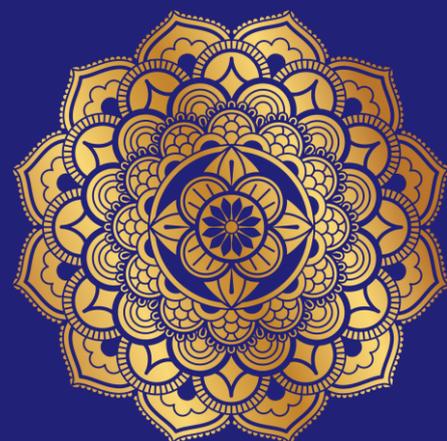
# PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

## LAPORAN KINERJA

### 2021

Nomor : LAP-01/PW31/6/2022

Tanggal : 5 Januari 2022





# Ringkasan Eksekutif

BPKP memasuki babak baru dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dimana ditegaskan bahwa peran BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah, serta pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden. BPKP menyongsong babak baru tersebut dengan membenahi diri, reposisi dan revitalisasi yang diawali dengan merumuskan visi, misi, dan strategi yang baru dan dilanjutkan dengan penyesuaian program dan kegiatan.

Dengan paradigma baru ini, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berusaha memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting*.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2021, juga mencerminkan sejauh mana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2021, capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 177,03%.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebanyak 27 (dua puluh tujuh), 26 (dua puluh enam) IKU tercapai 100% atau lebih dan 1 (satu) IKU tercapai 85,71% yaitu Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3.
3. Capaian sasaran kegiatan/output yang ditargetkan adalah 169 laporan pengawasan yang terdiri dari 59 laporan dari bidang IPP, 58 laporan dari bidang APD, 19 laporan dari bidang AN, 20 laporan dari bidang Investigasi, dan 13 laporan dari bidang P3A. Realisasi laporan yang terbit adalah sebanyak 207 laporan pengawasan, termasuk PKPT Generik dan tambahan, sehingga capaiannya sebesar 123,95%;
4. Penyerapan anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp16.988.630.075,00 atau terserap 99,92% dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp16.985.207.924,00;
5. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 15.709 Orang Hari (OH) atau mencapai 92,06 % dari potensi Orang Hari (OH) sebanyak 17.064 OH.



# KATA PENGANTAR



Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Pembangunan Nasional.

Sebagai implementasi atas amanah tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, 2) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional, 3) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha, 4) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi, 5) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU dan 6) Meningkatnya tata kelola unit kerja.

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024 serta Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban atas capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tersebut. Laporan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2021, analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta pembangunan di Provinsi Gorontalo.



Gorontalo, 5 Januari 2021  
Kepala Perwakilan,

Raden Murwantara  
NIP.19710114 199103 1 001



# DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan.....	1
B. Struktur Organisasi Unit Kerja .....	3
C. Aspek Strategis Organisasi .....	8
D. Sistematika Penyajian .....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....	13
A. Rencana Strategis 2020 – 2024 .....	13
1. Pernyataan Visi.....	13
2. Pernyataan Misi .....	14
3. Kegiatan dan Sasaran Strategis.....	15
4. Indikator Kinerja Utama.....	16
5. Sasaran Program.....	18
6. Program dan Kegiatan .....	21
B. Perjanjian Kinerja 2020 .....	28
1. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2020 .....	28
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 .....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32

A. Capaian Kinerja Organisasi.....	32
1. Ringkasan Kinerja.....	32
2. Uraian Kinerja .....	35
B. Kinerja Lainnya Tahun 2020 .....	77
1. Kinerja Lainnya .....	77
2. Penghargaan .....	77
C. Akuntabilitas Keuangan.....	78
BAB IV PENUTUP .....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	



# Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo .....	3
Gambar 1.2 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .....	12
Gambar 2.1 Penyusunan Target Output Perwakilan .....	28
Gambar 3.1 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi.....	37
Gambar 3.2 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi.....	38
Gambar 3.3 Capaian Indikator Kinerja Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah.....	39
Gambar 3.4 Capaian Indikator Kinerja Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah.....	41
Gambar 3.5 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah KP Yang Diawasi .....	43
Gambar 3.6 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah PSN yang tercapai sesuai target .....	44
Gambar 3.7 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah BUMD dengan kinerja sehat.....	47
Gambar 3.8 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi .....	48
Gambar 3.9 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase BUMDes yang mampu Menyusun laporan keuangan .....	50
Gambar 3.10 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan .....	53
Gambar 3.11 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan .....	54

Gambar 3.12 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3 .....	58
Gambar 3.13 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3.....	60
Gambar 3.14 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3.....	61
Gambar 3.15 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja.....	63
Gambar 3.16 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa.....	65
Gambar 3.17 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes.....	66
Gambar 3.18 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah Desa yagn Menerapkan Aset Desa Secara Memadai .....	68
Gambar 3.19 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja .....	70
Gambar 3.20 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Skor IKPA Unit Kerja .....	71
Gambar 3.21 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP .....	72
Gambar 3.22 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja .....	72
Gambar 3.23 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Unit Kerja .....	73
Gambar 3.24 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja .....	74
Gambar 3.25 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja .....	75
Gambar 3.26 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian RTP .....	76

Gambar 3.27 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Pengendalian Intern ..... 77



# Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Pangkat Golongan .....	6
Tabel 1.2 Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Struktur Jabatan .....	7
Tabel 1.3 Tabel SDM berdasarkan Komposisi Auditor .....	7
Tabel 1.4 Tabel SDM berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....	7
Tabel 1.5 Tabel SDM berdasarkan Usia .....	8
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Program Renstra 2020-2024 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2021 .....	19
Tabel 2.2 Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output).....	22
Tabel 2.3 Tabel Target Output per Bidang .....	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	30
Tabel 3.1 Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2021.....	32
Tabel 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah .....	35
Tabel 3.3 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi .....	36
Tabel 3.4 Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi.....	38
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara & Daerah.	39
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Nilai Penyelamatan Keuangan Negara .....	39
Tabel 3.7 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional.....	41
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Jumlah KP yang diawasi.....	42
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Jumlah PSN yang tercapai sesuai target .....	42

Tabel 3.10 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha .....	45
Tabel 3.11 Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2021 atas Kinerja BUMD Tahun 2020 .....	46
Tabel 3.12 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat .....	46
Tabel 3.13 Hasil Evaluasi Kinerja BLUD .....	47
Tabel 3.14 Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat .....	48
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan.....	50
Tabel 3.16 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	51
Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan.....	52
Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan.....	54
Tabel 3.19 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU .....	55
Tabel 3.20 Capaian Level Kapabilitas APIP s.d. 31 Desember 2021 .....	57
Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3 .....	57
Tabel 3.22 Capaian Level Maturitas SPIP s.d. 31 Desember 2021 .....	58
Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3 Tahun 2020 dan 2021.....	59
Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3 Tahun 2020 dan 2021 .....	61
Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemda yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Tahun 2020 dan 2021 .....	62

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa Tahun 2019 dan 2020 .....	64
Tabel 3.27 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes Tahun 2020 dan 2021.....	66
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa yang menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadari Tahun 2020 dan 2021 .....	67
Tabel 3.29 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" .....	68
Tabel 3.30 Persentase Penyelesaian RTP.....	75
Tabel 3.31 Persentase Efektifitas Pengendalian Intern.....	77
Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020.....	79



# Daftar Lampiran

Lampiran I Kinerja Sasaran Program dan Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.....	
Lampiran II Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2021 dengan Tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo .....	
Lampiran III Capaian Kinerja Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Dana/OH (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2021 .....	
Lampiran IV Perbandingan Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2021 dengan Tahun 2019 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .....	
Lampiran V Maturitas SPIP Pemda Tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo .....	
Lampiran VI Kapabilitas APIP Pemda Tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.....	
Lampiran VII Tingkat Kesehatan BUMD Tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.....	



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan intern pemerintah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

BPKP memiliki 34 perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang merupakan perwakilan dengan klasifikasi Tipe B setingkat eselon II berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/306/M.PAN-RB/2/2013 tentang Peningkatan Eselon 8 (delapan) Perwakilan BPKP serta Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

### 1. Kedudukan

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah Instansi Vertikal BPKP di daerah Gorontalo yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

### 2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Selain itu, berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
- c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
- d. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
- e. Pengawasan terhadap kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
- f. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- g. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/ BUMD;
- i. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta

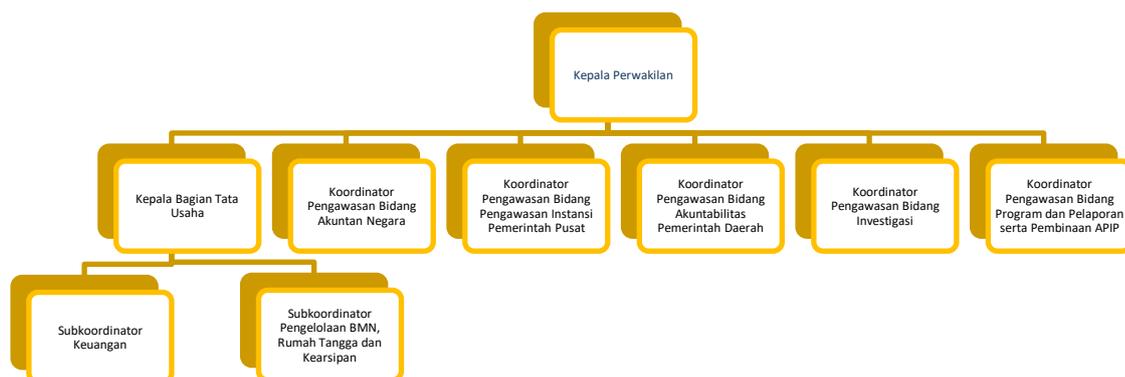
- kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - k. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan, dan
  - m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

## B. Struktur Organisasi Unit Kerja

### 1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bagan struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo



Sedangkan, susunan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo meliputi:

- a. Bagian Umum, yang terdiri dari Subkoordinator Keuangan dan Subkoordinator Pengelolaan BMN, Rumah Tangga dan Kearsipan;
- b. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP);
- c. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD);
- d. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Akuntan Negara (AN);
- e. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Investigasi;
- f. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A).

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan perpustakaan, protokoler, komunikasi dan informasi.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengelolaan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan perpustakaan, protokoler, komunikasi dan informasi; dan
  - 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di Perwakilan BPKP.
- b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan pengawasan serta mengendalikan mutu hasil pengawasan pada Instansi Pemerintah Pusat di daerah dan Pemda yang sumber

dananya berasal dari APBN, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

- c. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan.
- d. Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.
- e. Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
- f. Bidang P3A mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengelola, melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan bahan laporan realisasi kegiatan, penyusunan laporan berkala atas hasil-hasil pengawasan serta program pembinaan APIP (termasuk pembinaan jabatan fungsional auditor/JFA di lingkungan Perwakilan dan APIP Daerah).

Selain struktur organisasi tersebut di atas, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya

yaitu Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

## 2. Sumber Daya Manusia

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo didukung dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 72 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

### a. Berdasarkan Pangkat Golongan

Berdasarkan Pangkat Golongan, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV c	2
2.	Pembina Tingkat I	IV b	2
3.	Pembina	IV a	8
4.	Penata Tingkat I	III d	10
5.	Penata	III c	7
6.	Penata Muda Tingkat I	III b	16
7.	Penata Muda	III a	4
8.	Pengatur Tingkat I	II d	11
9.	Pengatur	II c	11
10.	Pengatur Muda Tk. I	II b	0
11.	Pengatur Muda	II a	1
<b>Jumlah</b>			<b>72</b>

### b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan  
Struktur Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural	2
2	Koordinator Pengawasan	5
3	Sub Koordinator	2
4	Fungsional Auditor	55
5	Fungsional Tertentu	5
6	Fungsional Umum	3
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>

Berdasarkan komposisi Auditor:

Tabel 1.3  
Tabel SDM berdasarkan Komposisi Auditor

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Auditor Madya	5
2.	Auditor Muda	11
3.	Auditor Pertama	20
4.	Auditor Penyelia	4
5.	Auditor Pelaksana	15
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>

c. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Tabel SDM berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	7
2	S1/D4	40
3	D3	24
4	D1	1
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>

d. Berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Tabel SDM berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (orang)
1	55<	1
2	51-55	8
3	41-50	11
4	31-40	24
5	<=30	28
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>

### C. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan Lembaga Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas BPKP sejalan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, sebagai bagian integral dari BPKP sepenuhnya mendukung BPKP dalam menjalankan peran strategisnya yaitu sebagai “**Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted**

**Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.**

Sesuai Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024, kegiatan yang menjadi tanggung jawab Perwakilan adalah Kegiatan Pengawasan Pembangunan, dengan 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah;
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional;
3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha;
4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi;
5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU;
6. Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas.

Selain itu, isu-isu strategis di wilayah Provinsi Gorontalo, antara lain:

1. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bulango Ulu;
2. Integrasi data bantuan sosial pusat dan daerah;
3. Ketepatan sasaran dan jumlah penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Program Bantuan Iuran PBPU/PB BPJS;
4. Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan manajemen risiko secara terstruktur mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi atas hasil penerapannya;
5. Percepatan dan penyaluran penggunaan dana desa yang digunakan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19, pemulihan stabilitas ekonomi nasional/daerah/desa dan pengawasannya oleh APIP;

6. Tata kelola BUMDes, *Good Corporate Governance* (GCG) PDAM dan bentuk badan hukum BUMD belum sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan belum sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Peningkatan pencegahan korupsi melalui pengukuran Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK);
9. Penilaian dan pengawasan risiko *fraud* pada kegiatan penyaluran bantuan sosial dan Pengadaan (PBJ) pada masa pandemi Covid 19 yang masih rendah;
10. Ketidaksielarasan pelaksanaan pembangunan nasional di daerah dalam hal tujuan, sasaran program/kegiatan di RKPD.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses bisnis pengawasan keuangan dan pembangunan selalu dilakukan *review* dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (*best practices benchmarking*) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya melalui kegiatan dan layanan produk antara lain:

1. Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa *assurance* dan *consulting* diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Audit Element*);
2. Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (*People Management Element*);
3. Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategis pengawasan berfokus pada kebutuhan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktik-praktik terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*);
4. Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIMHP dan SIMA untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber

daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*);

5. Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (*Organizational Relationship and Culture Element*);
6. Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam mitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (*Governance Structure Element*).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja (LKj) ini menginformasikan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021. Penyajian LKj 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

Gambar 1.2  
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj)





## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

### **A. Rencana Strategis 2020 - 2024**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul. Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Merujuk pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP secara nasional, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah menetapkan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Periode 2020-2024 pada 2 September 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor LSTRA-124/PW31/6/2020 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024. Renstra tersebut mengacu pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2020.

#### **1. Pernyataan Visi**

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

**“ Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”**

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2020 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

## **2. Pernyataan Misi**

Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan misi-misi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai berikut:



### 3. Kegiatan dan Sasaran Strategis

Sesuai Renstra BPKP Tahun 2020-2024, kegiatan yang menjadi tanggung jawab Perwakilan adalah Kegiatan Pengawasan Pembangunan, dengan 6 sasaran strategis yaitu:

- a. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah;
- b. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan nasional;
- c. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas badan usaha;
- d. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi;
- e. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas intern K/L/P/BU;
- f. Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

IKU BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat *outward looking* yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stakeholders* eksternal yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholders* internal BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo untuk tahun 2020-2024 sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor LSTRA-124/PW31/6/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi,
- 2) Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi,
- 3) Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah,
- 4) Nilai penyelamatan keuangan negara,
- 5) Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer
- 6) Nilai penyelamatan pengelolaan pembiayaan daerah
- 7) Jumlah KP yang diawasi,
- 8) Jumlah KP yang tercapai sesuai target,

- 9) Jumlah Program Lintas Sektoral pembangunan daerah yang tercapai sesuai target,
- 10) Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik,
- 11) Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan,
- 12) Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik,
- 13) Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat,
- 14) Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat,
- 15) Jumlah Bumdes mampu menyusun LK,
- 16) Presentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan,
- 17) Presentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan,
- 18) Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik,
- 19) Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik,
- 20) Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  level 3,
- 21) Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP  $\geq$  level 3,
- 22) Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI  $\geq$  level 3,
- 23) Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI  $\geq$  level 3,
- 24) Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja,
- 25) Tersedianya rekomendasi strategis kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota,
- 26) Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa,
- 27) Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa dengan memadai,
- 28) Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes,
- 29) Persentase BUMD dengan MRI  $\geq$  level 3,
- 30) Persentase BLUD dengan MRI  $\geq$  level 3,
- 31) Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI  $\geq$  level 3,

- 32) Jumlah BLUD dengan kapabilitas SPI  $\geq$  level 3,
- 33) Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja,
- 34) Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi,
- 35) Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu,
- 36) Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja.
- 37) Skor IKPA unit kerja,
- 38) Persentase SPM yang terbit tepat waktu,
- 39) Persentase penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP,
- 40) Nilai pengelolaan BMN unit kerja,
- 41) Nilai SAKIP unit kerja,
- 42) Maturitas SPIP unit kerja,
- 43) Indeks MR unit kerja,
- 44) Indeks kualitas layanan ketatausahaan unit kerja,
- 45) Indeks kepuasan layanan unit kerja.

## **5. Sasaran Program**

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra BPKP berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan.

Tabel 2.1  
Target Kinerja Sasaran Program Renstra 2020-2024  
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	278
		Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	463
		Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	186.779
		Nilai penyelamatan keuangan negara	Rupiah (Juta)	40.679
		Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer	Rupiah (Juta)	118
		Nilai penyelamatan pengelolaan pembiayaan daerah	Rupiah (Juta)	59
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi	Buah	7
		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Buah	7
		Jumlah Program Lintas Sektorial pembangunan daerah yang tercapai sesuai target	Buah	1
		Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik	%	25
		Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan,	%	80
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	Unit	0
		Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	Unit	3
		Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	Unit	1
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun LK	Unit	18
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target
	Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	75
		Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik	Unit	0
		Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik	Unit	0
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP $\geq$ level 3	APIP	7
		Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ level 3	Pemda	7
		Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI $\geq$ level 3	Pemda	0
		Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ level 3	Pemda	2
		Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja	%	0,92
		Tersedianya rekomendasi strategis kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota	Rekomendasi	1
		Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	%	45,05
		Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa dengan memadai	Unit	13
		Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes	Unit	1
		Persentase BUMD dengan MRI $\geq$ level 3	%	0
		Persentase BLUD dengan MRI $\geq$ level 3	%	0
		Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI $\geq$ level 3	Unit	0
		Jumlah BLUD dengan kapabilitas SPI $\geq$ level 3	Unit	0
		6	Meningkatnya Kualitas Layanan	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target
"Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100
	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100
	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100
	Skor IKPA Unit Kerja	Skor	87
	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	91
	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100
	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Skor	Baik
	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	81
	Maturitas SPIP Unit Kerja	Skor	Level 3
	Indeks MR Unit Kerja	Skor	Level 3
	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor	76
	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Skor	73

## 6. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang targetnya ditetapkan setiap tahun selama kurun waktu periode renstra yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi organisasi, dan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai terlaksananya kegiatan-kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2  
Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2021
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	3
2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	12
3	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	7

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2021
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	25
5	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Laporan	1
6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	23
7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	18
8	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	13
9	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	7
10	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara di	Laporan	5

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2021
	Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo		
11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	1
12	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	6
13	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	1
14	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Efektifitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Efektifitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	8
15	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	3
16	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	3
17	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	3

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2021
	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo			
18	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	1
19	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	1
20	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	1
21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	4
22	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	4
23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	3

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2021
24	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	3
25	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	3
26	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	1
27	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Efektifitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Efektifitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	1
28	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pembinaan Kapabilitas APIP di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pembinaan Kapabilitas APIP di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	2
29	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Laporan	4
30	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	Layanan Perkantoran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Layanan	1
		Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Layanan	1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2021
	Layanan Sarana Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Unit	40
	Layanan Prasarana Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Unit	2

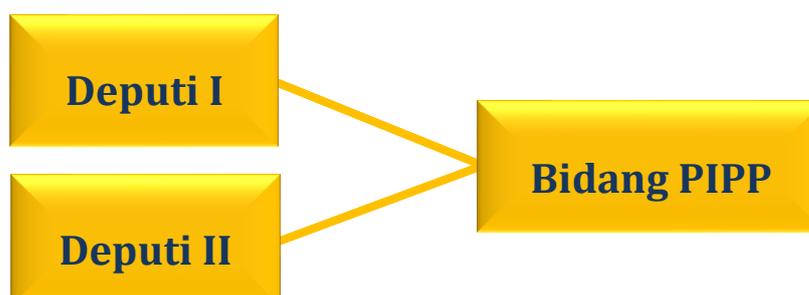
Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, target output pengawasan sebesar 169 Laporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

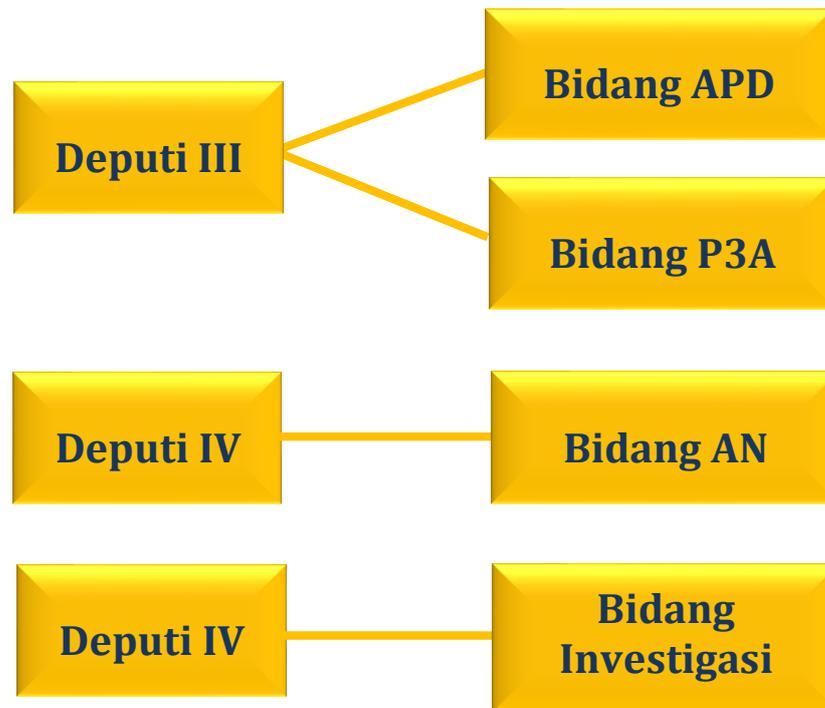
Tabel 2.3  
Tabel Target Output per Bidang

	Target Kinerja	Jumlah Laporan
<b>Bidang</b>	Pengawasan IPP	59
	APD	58
	AN	19
	Investigasi	20
	P3A	13
	TOTAL	169

Target *output* di atas berdasarkan target Laporan yang sudah ditetapkan oleh direktorat yang menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian (rendal) pada masing-masing kedeputian. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berfungsi melakukan kegiatan pengawasan di daerah sebagai dukungan kepada rendal untuk mencapai target tersebut. Jumlah output di atas akan berubah setiap tahun yang dijalani sesuai dengan target masing-masing rendal.

Gambar 2.1 Penyusunan Target Output Perwakilan





Perubahan atas desain penghitungan *output* perwakilan ini per tahun dijelaskan dalam Renja Tahunan.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan dengan kegiatan dukungan pengawasan.

## **B. Perjanjian Kinerja 2021**

### **1. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2021**

Kegiatan Pengawasan BPKP tahun 2021 didasarkan pada kebijakan di bidang pengawasan dan pembinaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), RPJMN, Renstra serta Renja 2020.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, kegiatan pengawasan yang mencakup tugas BPKP mencakup:

- a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan atas kegiatan tertentu, yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta kegiatan lainnya berdasarkan penugasan presiden.
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP, meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi APIP.

Kebijakan pengawasan BPKP juga mengacu kepada:

- a. RPJM 2020 - 2024 serta RKP 2021;
- b. Instruksi Presiden;
- c. Hasil Analisis Lingkungan Strategis;
- d. Isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah untuk kepentingan BPKP;
- e. Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2020 - 2024.

## **2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021**

Sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mendukung tercapainya dua sasaran program Deputi/Sekretariat Utama dengan delapan indikator kinerja. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bertanggung jawab untuk mencapai delapan sasaran program dan empat sasaran kegiatan dengan delapan belas indikator kinerja program dan enam indikator kinerja kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	278
		Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	463
		Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	185.546
		Nilai penyelamatan keuangan negara	Rupiah (Juta)	9.543
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi	Kegiatan Prioritas	7
		Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sesuai target	PSN	9
		Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diawasi	PSN	9
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	Unit	3
		Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	Unit	1
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun Laporan Keuangan	Unit	14
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	%	100,00
		Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	%	75,00
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ level 3	Prov	1
		Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ level 3	Kab/Kota	6
		Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP $\geq$ level 3	Prov	1
		Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP $\geq$ level 3	Kab/Kota	6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target
	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ level 3	Pemda	2
	Jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	Desa	296
	Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1
	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja	Pemda	1
	Jumlah Desa yang menerapkan aset desa secara memadai	Desa	1
6 Meningkatkan Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75
	Skor IKPA Unit Kerja	Skor	95
	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen	95
	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	80
	Persentase Penyelesaian RTP	Persen	100
	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern	Persen	65
	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor	76
	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Skor	73



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Tahun 2021

#### 1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo atas enam sasaran strategis yang dijabarkan dalam 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), menunjukkan bahwa 26 (dua puluh enam) IKU telah mencapai target, dan 1 (satu) IKU belum mencapai target. Ringkasan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2021

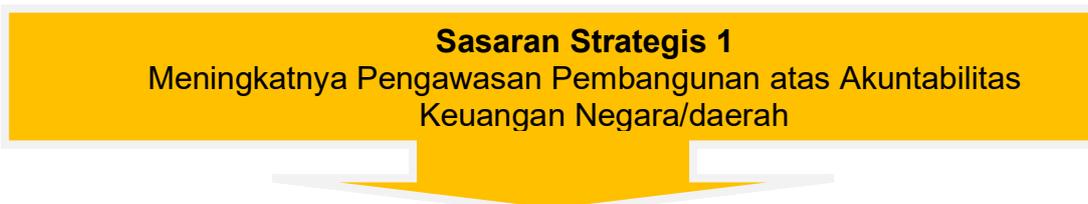
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Notifikasi
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah						
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Juta	278	323	116,19	★
1.2	Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Juta	463	762	164,58	★
1.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Juta	185.546	316.418,55	170,53	★
1.4	Nilai penyelamatan keuangan negara	Juta	9.543	49.865,57	522,54	★
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Nasional						
2.1	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	7	49	700,00	★

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Notifikasi
2.2	Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	9	9	100.00	
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						
3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	BUMD	3	3	100,00	
3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	BLUD	1	1	100,00	
3.3	Jumlah Bumdes mampu menyusun LK	BUMDes	14	26	185,71	
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						
4.1	Presentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	Persen	100	100	100,00	
4.2	Presentase hasil pengawasan prefentif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	Persen	70	85	113,33	
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
5.1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	K/L/Pemda	7	7	100,00	
5.2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	K/L/Pemda	7	6	85,71	
5.3	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Pemkab/Kota	2	2	100,00	
5.4	Jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	1	1	100,00	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Notifikasi
5.5	jumlah desa yg menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan desa	Desa	296	375	126,69	★
5.6	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan Aset Desa secara memadai	Desa	1	8	800,00	★
5.7	Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	1	100,00	★
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja						
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor skala 100	75	86,86	115,81	★
6.2	Skor IKPA Unit Kerja	Skor skala 100	95	96,42	101,49	★
6.3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen	95	100	105,26	★
6.4	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	80	87,12	108,90	★
6.5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	80	84,13	105,16	★
6.6	Persentase penyelesaian RTP	Persen	100	100	100,00	★
6.7	Persentase Efektifitas Pengendalian Intern	Persen	65	85	130,77	★
6.8	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	76	82	107,89	★
6.9	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	89,52	119,36	★
Total					177,03	

Keterangan: ★ = mencapai/melampaui target, ★ = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, ★ = belum mencapai target

## 2. Uraian Kinerja



Sasaran program Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah merupakan satu dari enam Sasaran Strategis BPKP yang dibebankan pada Perwakilan BPKP diseluruh Indonesia.

Capaian sasaran program ini diukur melalui empat IKU dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU  
Sasaran Strategis Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan  
Negara/Daerah

	<b>IKU</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/ daerah yang terealisasi	Juta	278	323	116,19
1.2	Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Juta	463	762	164,58
1.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Juta	185.546	316.418,55	170,53
1.4	Nilai penyelamatan keuangan negara	Juta	9.543	49.865,57	522,54

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari tiga IKU yang mendukung capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah”, seluruh IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” ini sebagai berikut:

### Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi

IKU “Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi” menggambarkan jumlah penerimaan daerah yang telah masuk ke kas daerah.

Kinerja indikator tersebut diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU Persentase Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi} = \frac{\Sigma \text{Penerimaan Negara/Daerah Tahun 2021}}{\Sigma \text{Target Penerimaan Negara/Daerah Tahun 2021}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi” tahun 2021 adalah sebesar Rp323.000.000,00 atau tercapai 190,52% dari target sebesar Rp278.000.000,00 dan telah melebihi target Renstra Tahun 2021.

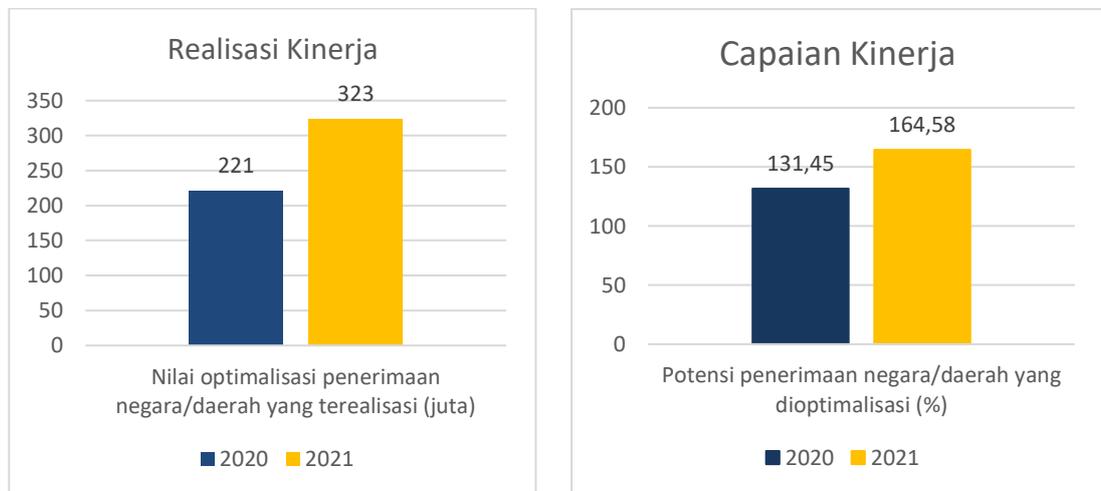
Tingginya pencapaian ini dikarenakan wajib pajak tertib dalam pembayaran pajak daerah.

Tabel 3.3  
Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2020			Tahun 2021			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	Capaian	
Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	116	221	190,52%	278	323	116,19%	(74,33%)

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2020 dan target akhir Renstra tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan pada Gambar 3.1.

**Gambar 3.1**  
**Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja**  
**Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi**



## 1.2

### **Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi**

IKU “Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi” menggambarkan jumlah potensi daerah yang telah digali dengan optimal dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi Potensi Penerimaan Negara/Daerah Yang Dioptimalisasi} = \frac{\Sigma \text{Potensi Penerimaan Negara/Daerah Yang Dioptimalisasi}}{\Sigma \text{Target Potensi Penerimaan Yang Dioptimalisasi}} \times 100\%$$

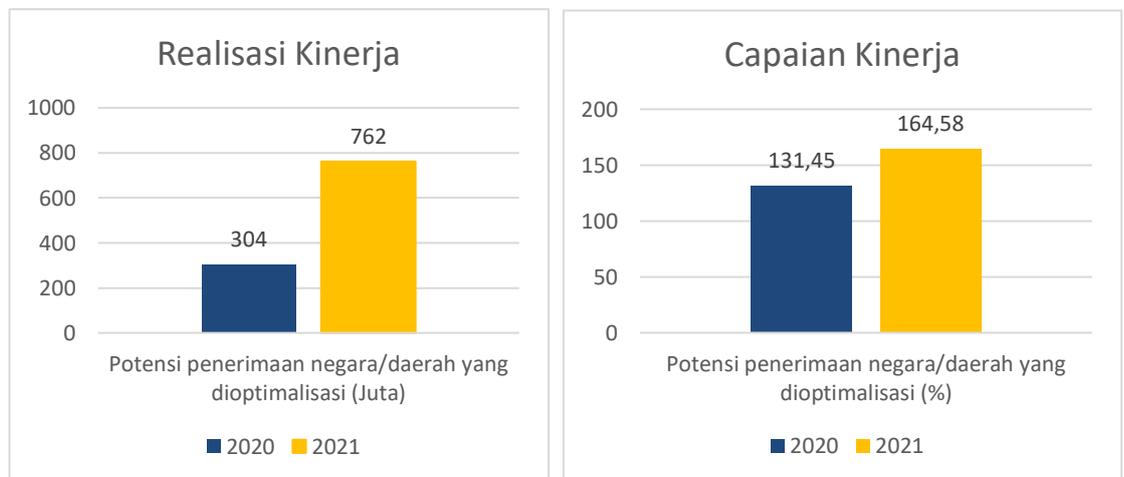
Realisasi IKU “Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi” tahun 2021 adalah sebesar Rp762.000.000,00 atau tercapai 164,58% dari target sebesar Rp463.000.000,00 dan telah melebihi target Renstra Tahun 2021.

Tingginya pencapaian ini dikarenakan wajib pajak tertib dalam pembayaran pajak daerah.

Tabel 3.4  
Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	Capaian	
Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	231	304	131,45%	463	762	164,58%	33,13%

Gambar 3.2  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja  
Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi



### 1.3

#### **Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah**

IKU “Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah” merupakan salah satu IKU penunjang Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah” yang nilai kinerjanya diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah} = \frac{\Sigma \text{Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah tahun 2021}}{\text{Target Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah tahun 2021}} \times 100\%$$

Realisasi Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah adalah Rp316.418.550.000,00 atau tercapai 170,53% dari target tahun 2021 sebesar Rp185.546.000.000,00. Realisasi tersebut juga sudah melebihi target Renstra 2021.

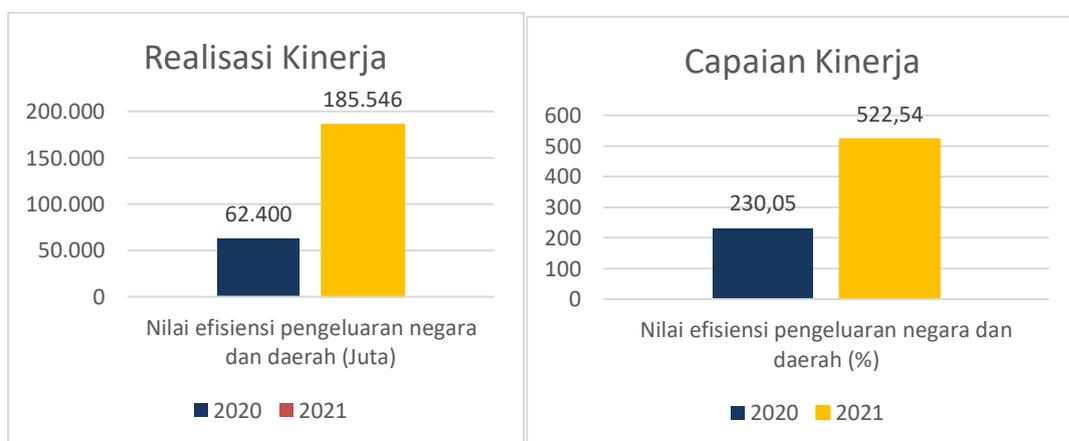
Capaian indikator Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah disajikan pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah**

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2020			Tahun 2021			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	Capaian	
Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	27.124	62.400	230,05%	185.546	316.418,55	522,54%	<b>292,49%</b>

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2021 disajikan pada Gambar 3.3.

**Gambar 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah**



**Nilai penyelamatan keuangan negara**

IKU “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara” merupakan salah satu IKU penunjang Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah” yang nilai kinerjanya diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara} = \frac{\Sigma \text{Nilai Penyelamatan Keuangan Negara tahun 2020}}{\text{Target Nilai Penyelamatan Keuangan Negara}} \times 100\%$$

Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara adalah Rp49.865.570.000,00 atau tercapai 522,54% dari target tahun 2021 sebesar Rp9.543.000.000,00. Realisasi tersebut juga sudah melebihi target Renstra 2021.

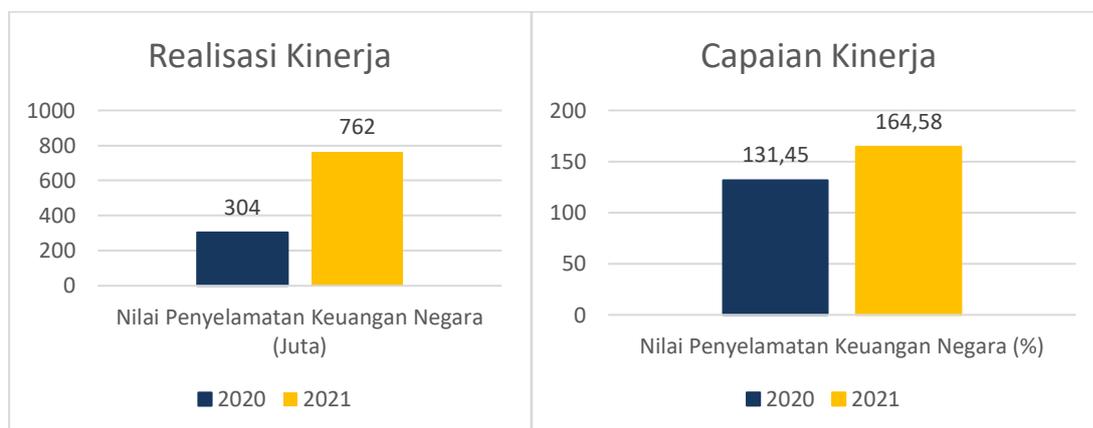
Capaian indikator Nilai Penyelamatan Keuangan Negara disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6  
Capaian Indikator Kinerja  
Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	Capaian	
Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	27.124	62.400	230,05%	9.543	49.865,57	522,54	<b>292,49%</b>

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2021 disajikan pada Gambar 3.4.

**Gambar 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah**



**Sasaran Strategis 2**  
**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Nasional**

Sasaran Strategis Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional merupakan Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur berdasarkan dua indikator kinerja. Capaian sasaran strategis dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7**  
**Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU**  
**Sasaran Strategis Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional**

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	7	49	700,00
2.2	Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	9	9	100,00

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa dari tiga IKU yang mendukung capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional”, seluruh IKU memiliki capaian 100% atau lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” ini sebagai berikut:

## 2.1

### ***Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi***

IKU “Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi” merupakan jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan pengawasan terhadap program prioritasnya.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah KP Yang Diawasi} = \frac{\Sigma \text{Realisasi KP Yang Diawasi}}{\Sigma \text{Target KP Yang Diawasi}} \times 100\%$$

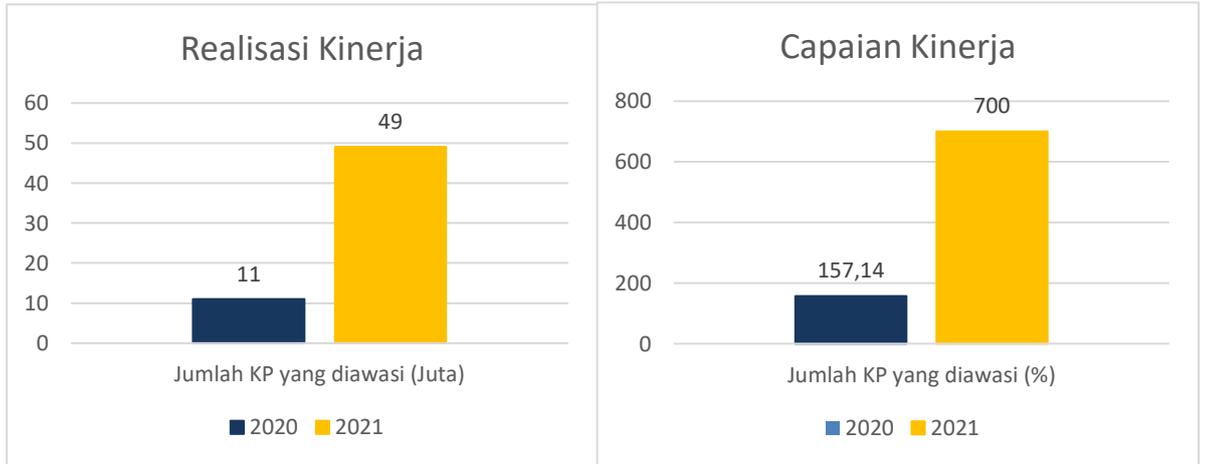
Realisasi IKU “Jumlah KP Yang Diawasi” tahun 2021 adalah sebesar 49 (empat puluh sembilan) kegiatan atau tercapai 700,00% dari target sebesar 7 (tujuh) kegiatan. Realisasi tersebut juga sudah melebihi target Renstra 2021.

Tabel 3.8  
Capaian Indikator Kinerja  
Jumlah KP yang diawasi

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah KP yang diawasi	7	11	157,14%	7	49	700,00%	542,86%

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2021 disajikan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja  
Jumlah KP yang diawasi



## 2.2

### ***Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target***

IKU “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target” merupakan jumlah KP yang telah terlaksana sesuai target. IKU tersebut merupakan pelaksanaan KP yang diawasi dan telah selesai sesuai target.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah PSN yang tercapai sesuai target} = \frac{\Sigma \text{Realisasi Jumlah PSN yang tercapai}}{\Sigma \text{Target Jumlah PSN sesuai tercapai}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah PSN yang Tercapai Sesuai Target” tahun 2021 adalah sebesar 9 (sembilan) kegiatan atau tercapai 100,00% dari target sebesar 9 (sembilan) kegiatan.

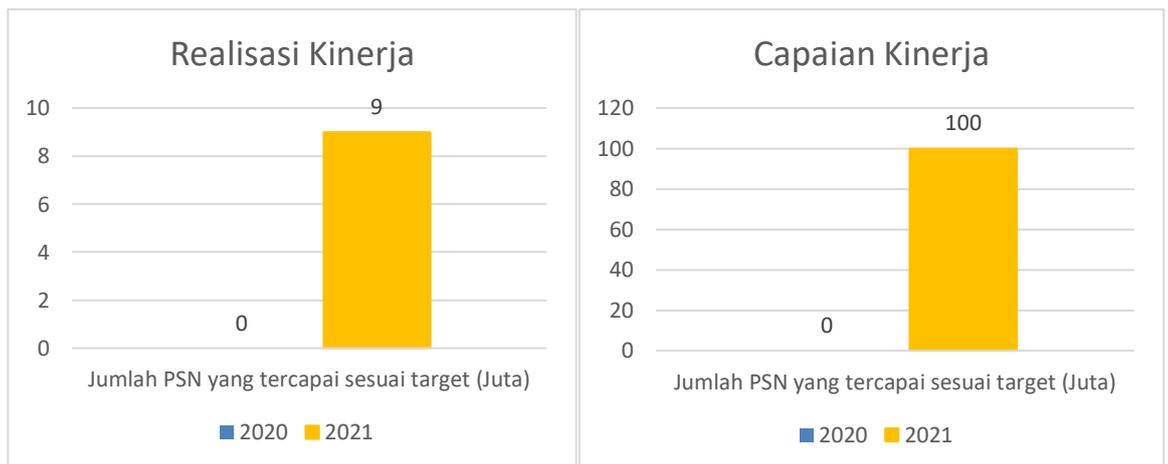
**Tabel 3.9**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Jumlah PSN yang tercapai sesuai target**

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	0	0	0	9	9	100.00	100.00 %

Capaian indikator kinerja jumlah PSN yang tercapai sesuai target tahun 2021 tidak dapat dibandingkan karena tahun 2020 tidak ada indikator kinerja jumlah PSN yang tercapai sesuai target.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2021 disajikan pada Gambar 3.6.

**Gambar 3.6**  
**Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja**  
**Jumlah PSN yang tercapai sesuai target**



**Sasaran Strategis 3**  
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” merupakan upaya mendukung agenda prioritas pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan untuk mendukung tata kelola pemerintah dan korporasi yang bersih dan efektif, serta diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan secara akuntabel, transparan, dan efektif.

Capaian sasaran program diukur melalui satu IKU dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10  
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	BUMD	3	3	100,00
3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	BLUD	1	1	100,00
3.3	Jumlah Bumdes mampu menyusun LK	BUMDes	14	26	187,71

Sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” didukung oleh capaian tiga IKU. Uraian capaian IKU sebagai berikut:

**3.2.**  
***Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat***

---

IKU “Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat” merupakan IKU dalam rangka mendukung target Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha,

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah melakukan evaluasi kinerja pada PDAM di wilayah Provinsi Gorontalo.

$$\text{Realisasi IKU Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat} = \frac{\Sigma \text{BUMD dengan Kinerja Sehat}}{\Sigma \text{Target BUMD dengan Kinerja Sehat}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat” tahun 2021 atas kinerja BUMD tahun 2020 adalah sebesar 3 BUMD atau tercapai 100,00% dari target sebanyak 3 BUMD, daftar predikat kinerja PDAM selengkapnya disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11  
Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2021  
atas kinerja BUMD tahun 2020

No	PDAM	Skor	Predikat
1	Kota Gorontalo	2,92	Sehat
2	Kab. Boalemo	2,68	Kurang Sehat
3	Kab. Bone Bolango	2,93	Sehat
4	Kab. Gorontalo	2,83	Sehat
5	Kab. Pohuwato	2,08	Sakit
6	Kab. Gorontalo Utara	2,02	Sakit

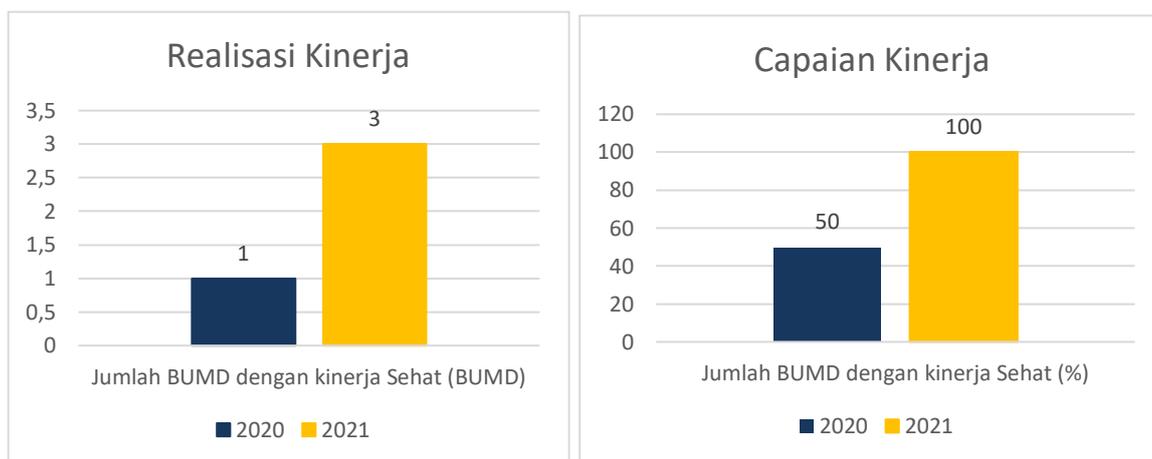
Capaian IKU “Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat” tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 50% dibandingkan tahun 2020.

Tabel 3.12  
Capaian Indikator Kinerja  
Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						
	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	2	1	50,00%	3	3	100,00%	50%

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2021 disajikan pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja  
Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat



### 3.3.

#### Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat

IKU “Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat” merupakan IKU dalam rangka Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha di wilayah Provinsi Gorontalo.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat} = \frac{\Sigma \text{BLUD dengan kinerja Sehat}}{\Sigma \text{BLUD yang dievaluasi}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat” tahun 2021 atas kinerja BLUD tahun 2020 adalah sebanyak 1 BLUD atau tercapai 100,00% dari target sebanyak 1 BLUD. Jumlah BLUD di Provinsi Gorontalo sebanyak 5 BLUD dan sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan evaluasi sebanyak 3 BLUD dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.13  
Hasil Evaluasi Kinerja BLUD

No	Nama BLUD	Skor Evakin	Predikat
1	RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe	66,09	A (Baik)
2	RSUD Dr. M. M. Dunda	58,38	BBB (Sedang)
3	RSUD Toto Kabila	62,10	BBB (Sedang)

Perbandingan capaian IKU “Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat” tahun 2021 dan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

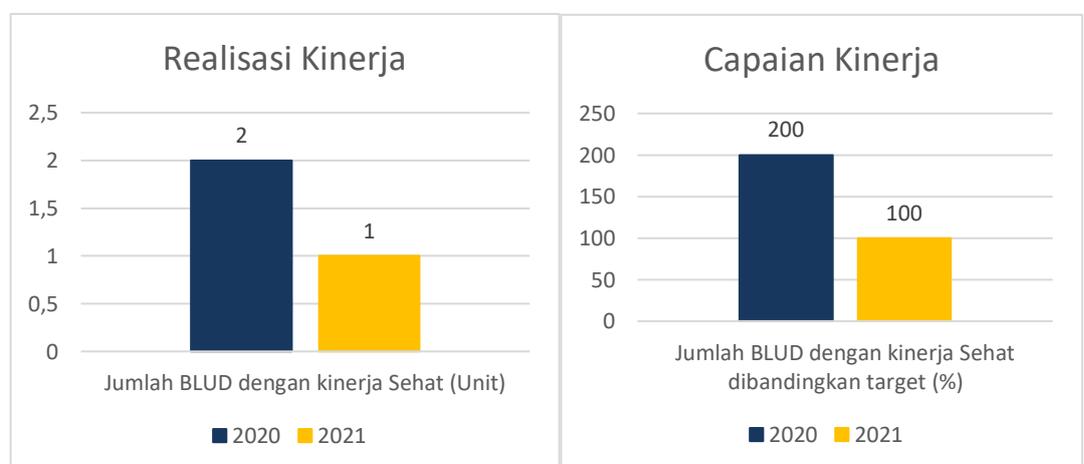
Tabel 3.14  
Capaian Indikator Kinerja  
Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi	1	2	200,00%	1	1	100,00%	100%

Realisasi IKU tahun 2021 sebesar 1 BLUD atau 100,00% dari target sebanyak 1 BLUD, dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami penurunan 100%.

Target, realisasi dan capaian kinerja “Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat” tahun 2021 dan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan dalam Gambar 3.8.

Gambar 3.8  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat



### ***BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan***

IKU “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan” merupakan IKU dalam rangka mendukung target meningkatnya Pegawai Pembangunan atas Badan Usaha.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\begin{array}{l}
 \text{Realisasi IKU BUMDes} \\
 \text{yang mampu menyusun} \\
 \text{laporan keuangan}
 \end{array}
 = \frac{\Sigma \text{BUMDes yang mampu} \\
 \text{menyusun laporan keuangan}}{\Sigma \text{target BUMDes yang} \\
 \text{mampu menyusun laporan} \\
 \text{keuangan di tahun 2021}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan” tahun 2020 adalah sebanyak 14 BUMDes atau 100,00% dari yang ditarget sebanyak 14 BUMDes. Jumlah BUMDes yang ada di Provinsi Gorontalo sebanyak 646 BUMDes yang tersebar di 5 Kabupaten, adapun jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan diperoleh berdasarkan hasil pemantauan atas peran BUMDes dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan BUMDes bersama dalam mendukung penguatan kewirausahaan dan UMKM dengan rincian sebagai berikut:

Capaian IKU “BUMDes yang mampu Menyusun laporan keuangan” tahun 2021 dan 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

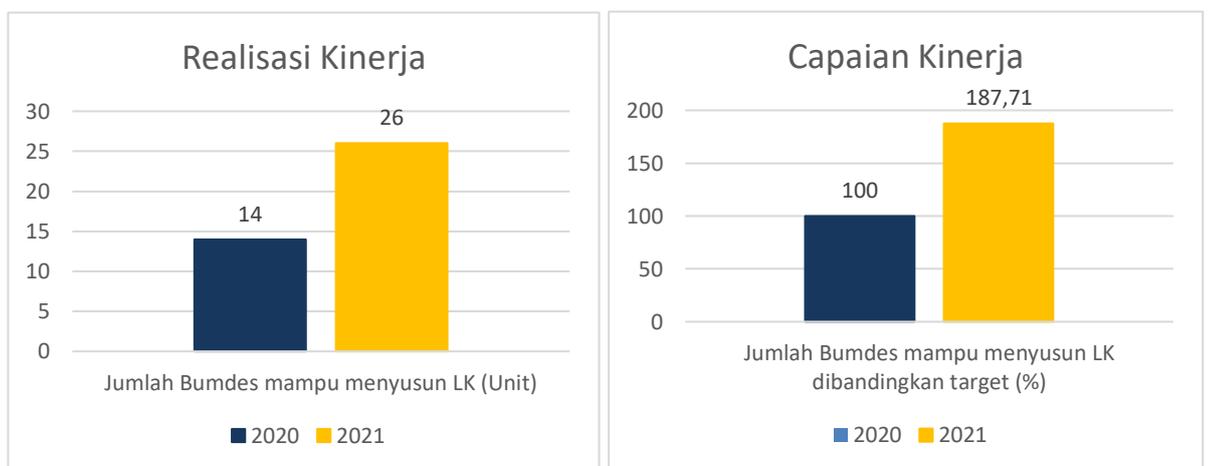
Tabel 3.15  
Capaian Indikator Kinerja  
BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						
	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	14	14	100 %	14	26	187,71%	87,71%

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2021 sebesar 187,71%, naik 87,71% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 100,00%. Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian IKU antara lain disebabkan meningkatkan perkembangan usaha BUMDes dan pengelolaan SDM sehingga membutuhkan laporan keuangan dalam rangka mendapatkan investasi dari pihak luar.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2021 sejumlah 18 BUMDes maka telah tercapai sebesar 100,00%, maka capaian IKU tahun 2021 mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2021 telah tercapai.

Gambar 3.9  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase BUMDes yang mampu Menyusun laporan keuangan



**Sasaran Strategis 4**  
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Sasaran Program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” merupakan upaya mendukung capaian Sasaran Program Pengawasan Pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian;

b. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi.

Capaian sasaran program diukur melalui dua IKU dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.16  
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian  
IKU Sasaran Program Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas  
Pengendalian Korupsi

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1	Presentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	100	100	100,00
4.2	Presentase hasil pengawasan prefentif dan edukatif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	75	85	113,33

Tabel 3.17 menunjukkan bahwa dari dua IKU yang mendukung capaian sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi”, seluruhnya memiliki capaian 100% atau lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” adalah sebagai berikut:

#### 4.1

#### ***Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Ditindaklanjuti/ Dimanfaatkan***

IKU “Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” merupakan tingkat penyelesaian pengawasan represif bidang investigasi berupa Audit Investigatif, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Audit Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\begin{array}{l}
 \text{Realisasi IKU Persentase} \\
 \text{hasil pengawasan represif} \\
 \text{yang ditindaklanjuti/} \\
 \text{dimanfaatkan}
 \end{array}
 = \frac{\Sigma \text{LHAI+LHAPKKN+LHATT yang} \\
 \text{ditindaklanjuti/dimanfaatkan 2021}}{\Sigma \text{LHAI+LHAPKKN+LHATT} \\
 \text{yang terbit 2021}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” tahun 2021 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%.

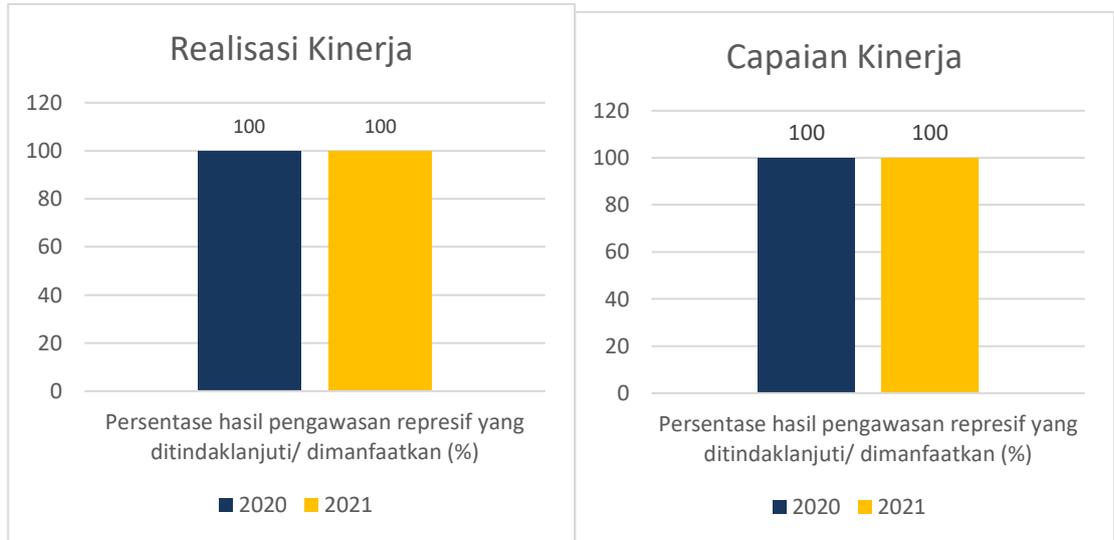
Capaian IKU “Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” sampai dengan tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.17  
 Capaian Indikator Kinerja  
 Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan

Sasaran Strategis 4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						
	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	-

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2021 disajikan pada Gambar 3.10.

**Gambar 3.10**  
**Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan**



## 4.2

### ***Presentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan***

IKU “Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” merupakan tingkat penyelesaian pengawasan preventif dan edukatif berupa kegiatan *Fraud Risk Assessment (FRA)*, *Fraud Control Plan (FCP)*, Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh stakeholders.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan} = \frac{\sum \text{LAP Preventif dan Edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan 2021}}{\sum \text{LAP Preventif dan Edukatif yang terbit 2021}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” tahun 2021 adalah sebesar 85,00% atau tercapai 113,33% dari target sebesar 75,00%.

Analisis capaian IKU “Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan“ sampai dengan tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

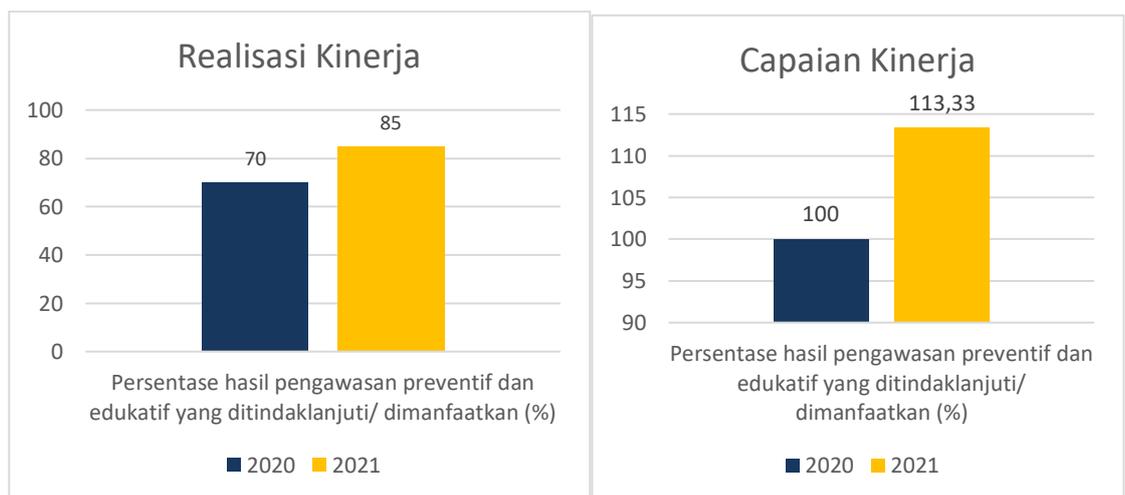
Tabel 3.18  
Capaian Indikator Kinerja  
Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang  
ditindaklanjuti/dimanfaatkan

Sasaran Strategis 4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2020			Tahun 2021			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	70,00%	70,00%	100,00%	75,00%	85,00%	113,33%	13,33%

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2021 sebesar 85,00% dari target sebesar 75,00%. Capaian IKU tahun 2021 sebesar mengalami peningkatan sebesar 13,33% dibandingkan dengan tahun 2020.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2021 disajikan pada Gambar 3.11

Gambar 3.11  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan



**Sasaran Strategis 5**  
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU BPKP didukung dengan pencapaian Sasaran Program Pengawasan Pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha;

Sasaran Strategis tersebut di atas akan dicapai dan diukur melalui capaian tujuh Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam merealisasikan pengawasan pembangunan atas efektivitas kualitas pengendalian intern K/L/P/BU secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan, terdiri dari:

Tabel 3.19  
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian  
IKU Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.1	Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	K/L/Pemda	7	7	100,00
5.2	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	K/L/Pemda	7	6	85,71
5.3	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Pemda Kab/Kota	2	2	100,00
5.4	Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja	%	1	1	100,00

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.5	Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	Desa	296	375	126,69
5.6	Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	1	100,00
5.7	Jumlah Desa yang menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai	Desa	1	8	800

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU” ini adalah:

### **5.1**

#### ***Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3***

IKU “Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3” merupakan Indikator yang memperlihatkan jumlah APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3 Kapabilitas APIP.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP} \geq \text{Level 3} = \frac{\sum \text{PemProv/kab/kota Min Level 3 APIP}}{\sum \text{Seluruh PemProv/kab/kota}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3” tahun 2021 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan tujuh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan kapabilitas minimal level 3 APIP dibandingkan dengan tujuh APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 sebagai berikut:

Tabel 3.20  
Capaian Level Kapabilitas APIP s.d. 31 Desember 2021

No.	Nama APIP	Skor	Level
1.	Kota Gorontalo	3	3
2.	Kabupaten Gorontalo	3	3
3.	Kabupaten Boalemo	3	3
4.	Kabupaten Bone Bolango	3	3
5.	Kabupaten Gorontalo Utara	3	3
6.	Kabupaten Pohuwato	3	3
7.	Provinsi Gorontalo	3	3

Analisis capaian IKU “Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3” sampai dengan tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.21  
Capaian Indikator Kinerja  
Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	7	7	100%	7	7	100%	-

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2020 sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan target awal periode Renstra pada Tahun 2021 sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2021 telah mencapai target yang diharapkan.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2021 disajikan pada Gambar 3.12.

**Gambar 3.12**  
**Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja**  
**Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3**



## 5.2

### Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

IKU “Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3” merupakan wujud dari proses *governance* Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP} \geq \text{Level 3} = \frac{\sum \text{PemProv/kab/kota Min Level 3 SPIP}}{\sum \text{seluruh Pemkab/kota}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3” tahun 2021 adalah sebanyak 6 Pemda atau mencapai 85,71% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 7 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP minimal

level 3 dibandingkan dengan 7 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah mencapai maturitas SPIP level 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22  
Capaian Level Maturitas SPIP s.d. 31 Desember 2021

No	Nama Pemda	Skor	Level
1.	Provinsi Gorontalo	3,125	3
2.	Kota Gorontalo	3,106	3
3.	Kabupaten Boalemo	3,000	3
4.	Kabupaten Bone Bolango	3,000	3
5.	Kabupaten Gorontalo	3,083	3
6.	Kabupaten Gorontalo Utara	2,900	2
7.	Kabupaten Pohuwato	3,046	3

Analisis capaian IKU “Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3” sampai dengan tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel berikut:

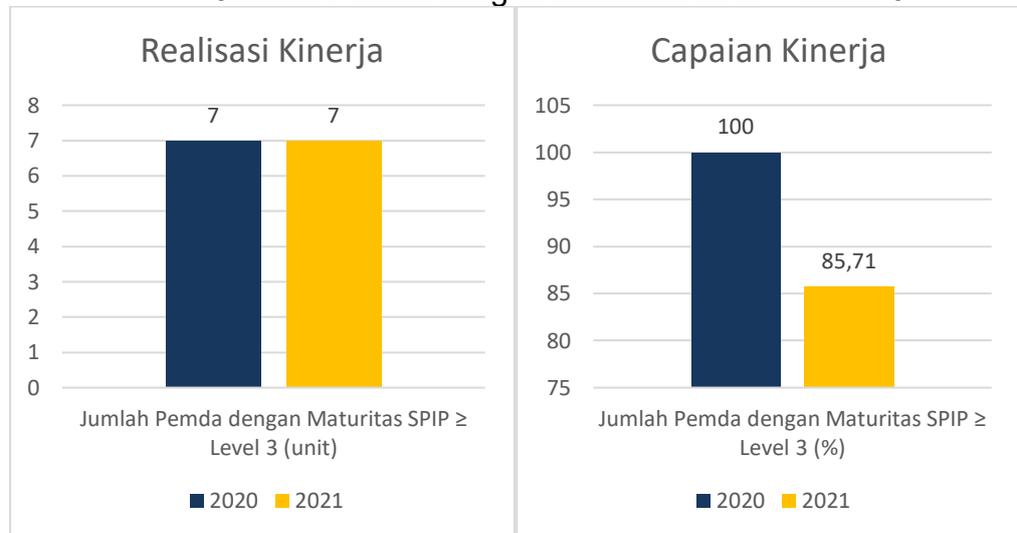
Tabel 3.23  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja  
Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3  
Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	7	7	100%	7	6	85,71%	14,29%

Realisasi IKU tahun 2021 adalah sebesar 85,71%, lebih rendah dari realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2021 menurun sebesar 14,29% menjadi 85,71% dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2021 adalah 7 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan

BPKP Provinsi Gorontalo, maka realisasi IKU tahun 2021 adalah belum seluruh Pemda atau sebesar 85,71%.

Gambar 3.13  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja  
Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3



### 5.3

#### Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3

IKU “Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3” sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas “Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi”. Pemerintah menargetkan sebanyak 79,31% Kementerian/Lembaga, 62% Pemerintah Provinsi, dan 39% Pemerintah Kabupaten Kota berada pada Level 3 Indeks Penerapan Manajemen Risiko di akhir periode RPJMN.

Indikator yang mencerminkan nilai kinerja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah Pemda dengan MRI} \geq \text{Level 3} = \frac{\sum \text{PemProv/kab/kota Min Level 3 MRI}}{\sum \text{target PemProv/kab/kota Min Level 3 MRI}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3” tahun 2021 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan terdapat 2 (dua) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan MRI minimal Level 3 dibandingkan

dengan dua Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi target IKU tahun 2021.

Tabel 3.24  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja  
Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3 Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						Capaian Naik/ (Turun)
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	1	0	0%	2	2	100%	100%

Pemerintah Daerah yang telah memperoleh MRI level 3 yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.

Analisis capaian IKU “Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3” sampai dengan tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah sebesar 100% lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 0%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2021 sebanyak 2 Pemda, maka realisasi IKU tahun 2021 sebesar 100% yang menunjukkan bahwa kinerja tahun 2021 sudah tercapai.

Gambar 3.14  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja  
Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3



## 5.4

### **Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja**

IKU “Persentase Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja” merupakan jumlah Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan opini WTP laporan keuangan dan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\begin{array}{l}
 \text{Realisasi IKU Persentase} \\
 \text{Jumlah Pemda Yang} \\
 \text{Akuntabel Pengelolaan} \\
 \text{Keuangan dan Kinerja}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \Sigma \text{ Realisasi Jumlah Pemda} \\
 \text{Yang Akuntabel} \\
 \text{Pengelolaan Keuangan dan} \\
 \text{Kinerja}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \Sigma \text{ Target Jumlah Pemda} \\
 \text{Yang Akuntabel} \\
 \text{Pengelolaan Keuangan dan} \\
 \text{Kinerja}
 \end{array}} \times 100\%$$

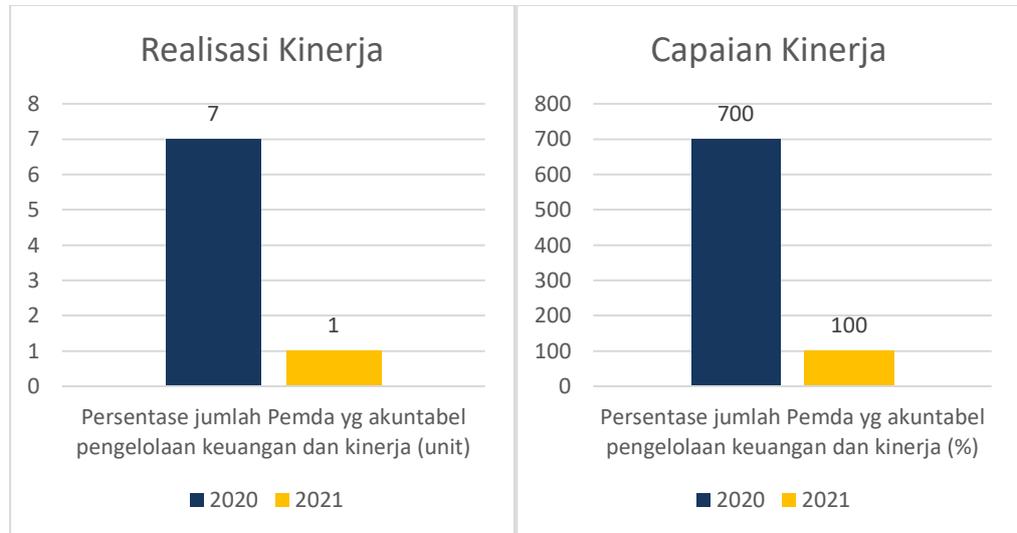
Realisasi IKU “Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja” tahun 2021 adalah sebanyak 1 (satu) Pemda yaitu Kabupaten Bone Bolango atau tercapai 100% dari target.

Tabel 3.25  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja  
Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Tahun  
2020 dan 2021

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2020			Tahun 2021			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	1	7	700%	1	1	100%	100%

Realisasi capaian IKU “Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja” sampai dengan tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah sebesar 100%, lebih rendah dari realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 700% .

**Gambar 3.15**  
**Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja**  
**Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja**



**5.5.**

**Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa**

IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tata pemerintahannya dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Indikator yang mencerminkan nilai kinerja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa} = \frac{\Sigma \text{Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa}}{\Sigma \text{target Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” tahun 2021 adalah sebesar 126,69%, dengan perhitungan 375 Pemerintah Desa yang telah menyusun LPJ Keuangan desa dibandingkan dengan 296 Pemerintah Desa yang menjadi target dalam IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2021 yaitu Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa, maka realisasi IKU tahun 2021 sebesar 126,69%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2021 tercapai.

Tabel 3.26  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja  
Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa  
Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	40,03%	100%	249,81%	296 desa	375 desa	126,69%	123,12%

Capaian IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” sampai dengan tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah sebesar 126,69% tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020 karena terdapat perbedaan target tahun 2020 yang menggunakan satuan persentase, sementara tahun 2021 menggunakan satuan jumlah unit desa.

**Gambar 3.17**  
**Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja**  
**Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa**



## 5.6

### Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes

IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” merupakan wujud pelaksanaan amanah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mencakup pelaksanaan dari wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa. Ruang lingkup pengawasan yang luas meliputi pengawasan pengelolaan keuangan terakrit kegiatan antar desa / kawasan perdesaan, atau kegiatan bersama desa dan pihak lainnya, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa lainnya. Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi aparat penawasan intern pemerintah (APIP) kabupaten untuk dapat menyelenggarakan pengawasan yang efektif atas pengelolaan keuangan desa.

Indikator yang mencerminkan nilai kinerja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes} = \frac{\Sigma \text{ APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes}}{\Sigma \text{ target APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” tahun 2021 adalah sebanyak 1 Pemda atau mencapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 1 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Siswaskeudes dibandingkan dengan 1 APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi target IKU Tahun 2021.

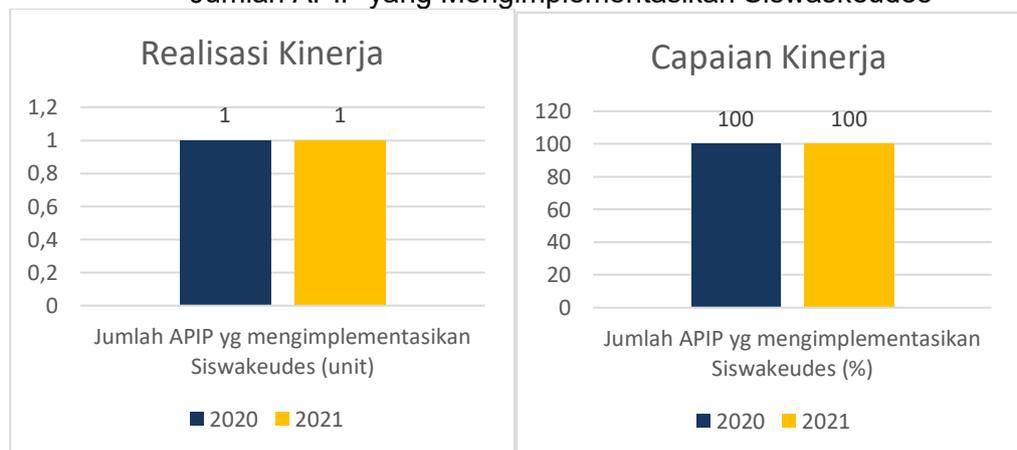
Tabel 3.27  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja  
Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes  
Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2020			Tahun 2021			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	1	1	100%	1	1	100%	100%

APIP yang telah mengimplementasikan Siswaskeudes adalah Kabupaten Bone Bolango.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2021 yaitu Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes, maka realisasi IKU tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2021 tercapai. Analisis capaian IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” sampai dengan tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah 100%, sama dengan realisasi capaian tahun 2020.

Gambar 3.18  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja  
Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes



## 5.7 Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Indikator yang mencerminkan “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai ” dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Realisasi IKU Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai} = \frac{\Sigma \text{APIP yg menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai}}{\Sigma \text{target APIP yg menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai” tahun 2021 adalah sebesar 800%, dengan perhitungan 8 Desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai dibandingkan dengan 1 Desa yang menjadi target dalam IKU “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai” tahun 2021. 8 Desa Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai adalah Bulila, Dulamayo, Talumelito, Paris, Dunggala, Botumoputi, Daenaa, Isimu Uara.

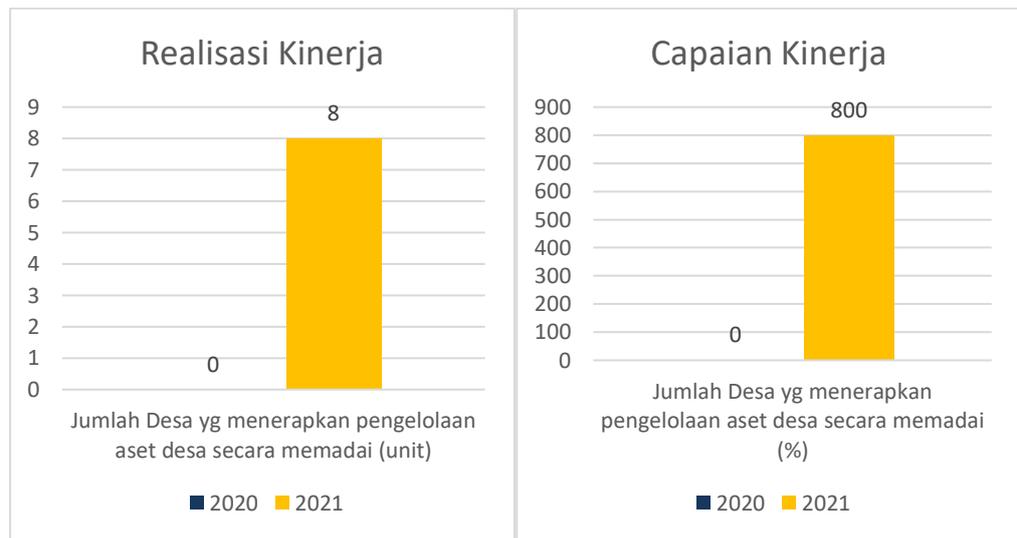
Tabel 3.28  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja  
Persentase jumlah desa yg Menerapkan  
Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai  
Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase jumlah desa yg Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai	0	0	0%	1	8	800%	800%

Capaian IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai” sampai dengan tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah sebesar 800% tidak bisa dibandingkan dengan

tahun 2020 karena pada tahun 2020 tidak ada target capaian IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai”.

**Gambar 3.19**  
**Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja**  
**Persentase Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai**



**Sasaran Strategis 6**  
**Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja**

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja” didukung dengan 12 IKU, yaitu:

**Tabel 3.29**  
**Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian**  
**IKU Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan"**

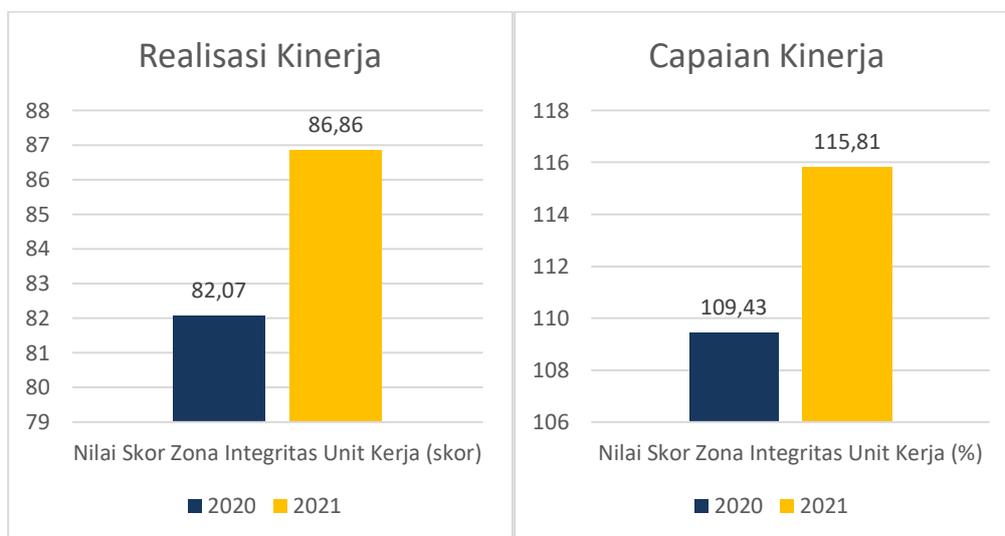
No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75	86,86	115,81

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.2	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	95	96,42	101,49
6.3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	%	95	100	105,26
6.4	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80	87,12	108,90
6.5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	80	84,13	105,16
6.6	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor	76	82	107,89
6.7	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Skor	75	89,52	119,36
6.8	Persentase Penyelesaian RTP	%	100	100	100,00
6.9	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern	%	65	85	130,77

### **6.1.** **Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja**

IKU “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai dengan dilaksanakannya Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan nilai 86,86 , lebih besar daripada target Perkin tahun 2021 sebesar 75,00.

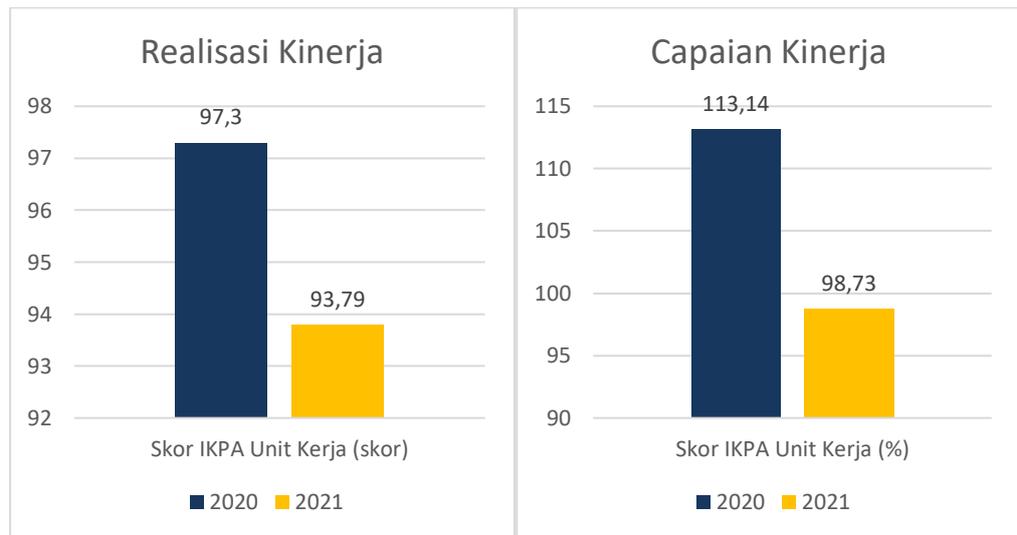
Gambar 3.20  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja



## 6.2. **Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)**

IKU “Skor IKPA Unit Kerja” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai berdasarkan penilaian oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga yang dirilis melalui aplikasi MonevPA dengan nilai sebesar 96,42, lebih tinggi daripada target Perkin tahun 2021 sebesar 95,00, atau mencapai 101,49%.

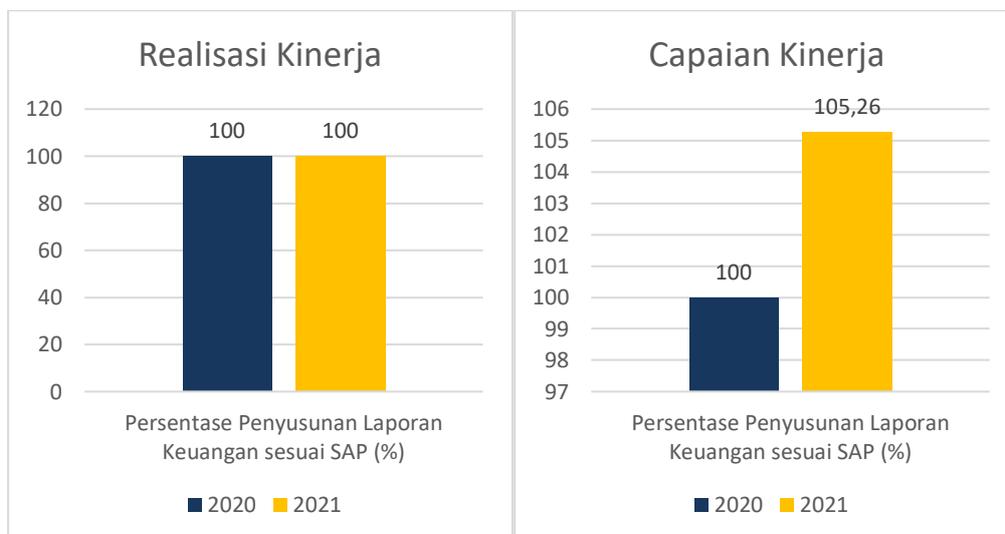
Gambar 3.21  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Skor IKPA Unit Kerja



### 6.3. ***Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)***

IKU “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai dengan dilaksanakannya rekonsiliasi internal dengan Biro Keuangan dan Inspektorat atas Laporan Keuangan Tahun 2020, Laporan Semesteran Tahun 2021 dan Laporan Triwulan III Tahun 2021 serta rekonsiliasi eksternal bulanan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui aplikasi E-Rekon LK dengan persentase sebesar 100 persen lebih besar dibandingkan dengan target Perkin tahun 2021 sebesar 95 persen.

Gambar 3.22  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP



#### 6.4.

#### ***Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)***

IKU “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai dengan nilai sebesar 87,12 lebih besar dengan target Perkin tahun 2021 sebesar 80.

Gambar 3.23  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja



## 6.5. Nilai SAKIP Unit Kerja

IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi dan untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), BPKP sebagai lembaga pemerintah berkewajiban untuk mengimplementasikan SAKIP yang efektif.

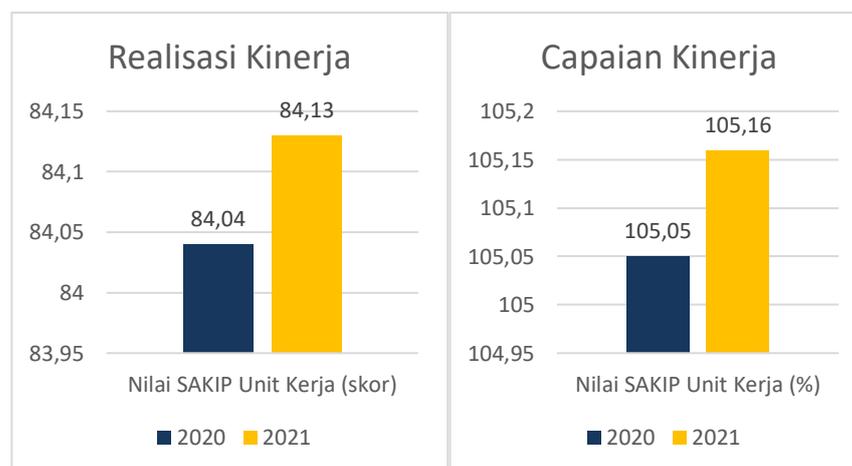
Indikator yang mencerminkan nilai kinerja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi Nilai SAKIP Unit Kerja} = \frac{\text{Nilai SAKIP Unit Kerja}}{\text{Target Nilai SAKIP Unit Kerja}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja” tahun 2021 adalah sebesar 105,15% atau melebihi target sebesar 100% dengan skor Nilai SAKIP Unit Kerja sebesar 84,13 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat BPKP.

Analisis capaian IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja” sampai dengan tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki realisasi IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja” sebesar 105,05%.

Gambar 3.24  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Unit Kerja



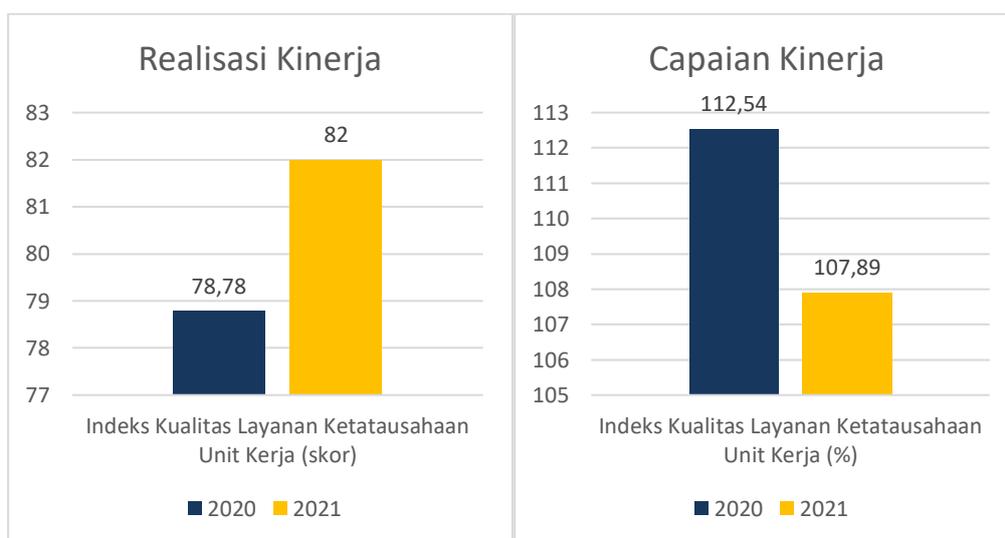
## 6.6.

### ***Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja***

Realisasi IKU “Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja” adalah sebesar 82. Hal ini merupakan hasil dari pengisian kuisioner kepuasan pelayanan Tata Usaha yang diisi oleh seluruh pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan dalam Perkin tahun 2021 sebesar 76, atau tercapai 107,89%

Gambar 3.25

Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja

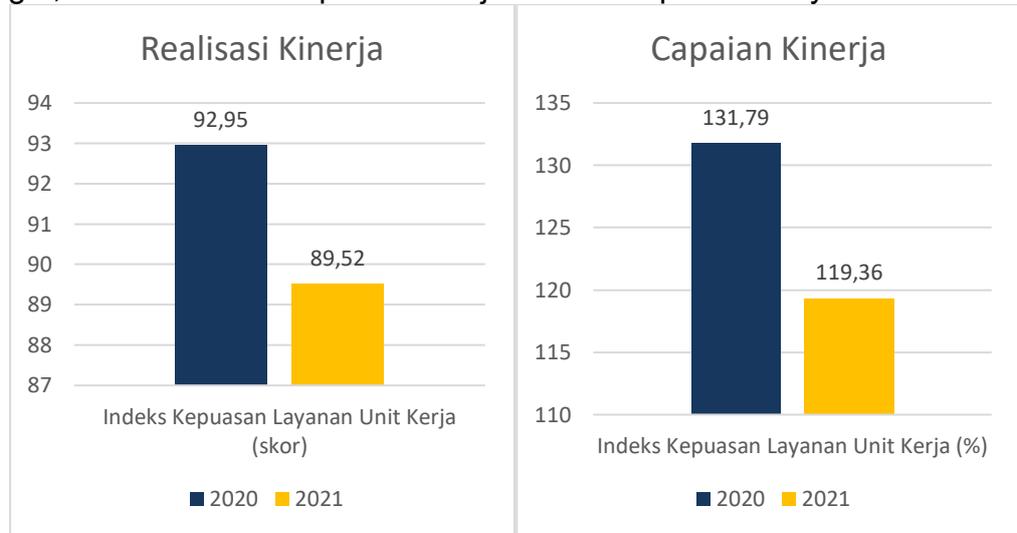


## 6.7.

### ***Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)***

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Penilaian Mandiri Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja dengan nilai sebesar 89,52 lebih besar daripada target Perkin tahun 2021 sebesar 75,00.

Gambar 3.26  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja



### 6.8. **Persentase Penyelesaian RTP**

IKU “Presentase Penyelesaian RTP” mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Presentase Penyelesaian RTP} = \frac{\Sigma \text{Realisasi Jumlah Penyelesaian RTP}}{\Sigma \text{Target Jumlah Penyelesaian RTP}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Presentase Penyelesaian RTP” tahun 2021 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%.

Tabel 3.30  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja  
Persentase Penyelesaian RTP  
2020 dan 2021

Sasaran Strategis 6	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Penyelesaian RTP	0	0	0	100	100	100%	100%

Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, disebabkan belum terdapat IKU “Persentase Penyelesaian RTP” di tahun 2020.

Gambar 3.27  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja  
Persentase Penyelesaian RTP



## 6.9

### Persentase Efektifitas Pengendalian Intern

IKU “Persentase Efektifitas Pengendalian Intern ” mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase Efektifitas Pengendalian Intern} = \frac{\sum \text{Realisasi Jumlah Efektifitas Pengendalian Intern}}{\sum \text{Target Jumlah Efektifitas Pengendalian Intern}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase Efektifitas Pengendalian Intern” tahun 2021 adalah sebesar 85% dari target sebesar 65%.

Tabel 3.31  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja  
Persentase Efektifitas Pengendalian Intern  
2020 dan 2021

Sasaran Strategis 6	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Efektifitas Pengendalian Intern	0	0	0	65	85	130,77%	130,77%

Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, disebabkan tidak terdapat IKU “Persentase Efektifitas Pengendalian Intern” di tahun 2020.

Gambar 3.28  
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja  
Persentase Efektifitas Pengendalian Intern



## B. KINERJA LAINNYA TAHUN 2021

### 1. Kinerja Lainnya

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 telah melaksanakan inovasi yang dapat dikategorikan ke dalam kinerja lain yaitu Model Pengawasan Terintegrasi, Sistem Informasi Kolaborasi Elektronik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SiKepo), Perhitungan Kinerja PDAM, dan Test Integritas.

## **2. Penghargaan**

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 meraih penghargaan unit kerja yang meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN dan RB.

## **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar Rp16.985.207.924,00 atau terserap 99,92% dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp16.999.494.000,00.



# BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran program dan IKU tahun 2021, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Dari uraian capaian kinerja pada Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa atas 27 (dua puluh tujuh) IKU yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, masih terdapat 1 (satu) IKU yang belum tercapai yaitu Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Capaian Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo  
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	IKU	Capaian IKU (%)	Ket
1	Sasaran Strategis 1	IKU 1.1	116,19%	Tercapai
		IKU 1.2	164,58%	Tercapai
		IKU 1.3	170,53%	Tercapai
		IKU 1.4	522,54%	Tercapai
2	Sasaran Strategis 2	IKU 2.2	700,00%	Tercapai
		IKU 2.4	100,00%	Tercapai
3	Sasaran Strategis 3	IKU 3.3	100,00%	Tercapai
		IKU 3.4	100,00%	Tercapai
		IKU 3.5	185,71%	Tercapai
4	Sasaran Strategis 4	IKU 4.1	100,00%	Tercapai
		IKU 4.2	113,33%	Tercapai
5	Sasaran Strategis 5	IKU 5.1	100,00%	Tercapai
		IKU 5.2	85,71%	Tidak Tercapai
		IKU 5.4	100,00%	Tercapai
		IKU 5.5	100,00%	Tercapai
		IKU 5.7	126,69%	Tercapai

No	Sasaran Strategis	IKU	Capaian IKU (%)	Ket
		IKU 5.8	800,00%	Tercapai
		IKU 5.9	100,00%	Tercapai
6	Sasaran Strategis 6	IKU 6.1	115,81%	Tercapai
		IKU 6.5	101,49%	Tercapai
		IKU 6.7	105,26%	Tercapai
		IKU 6.8	108,90%	Tercapai
		IKU 6.9	105,16%	Tercapai
		IKU 6.11	100,00%	Tercapai
		IKU 6.12	130,77%	Tercapai
		IKU 6.13	107,89%	Tercapai
		IKU 6.14	119,36%	Tercapai

Uraian ringkas hasil pengukuran dari delapan IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. IKU “Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi”  
Realisasi IKU “Persentase penerimaan negara/daerah yang terealisasi” tahun 2021 adalah sebesar Rp323.000.000,00 atau tercapai 116,19% dari target sebesar Rp278.000.000,00.
2. IKU “Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi”  
Realisasi IKU “Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi” tahun 2021 adalah sebesar Rp762.000.000,00 atau tercapai 164,58% dari target sebesar Rp463.000.000,00.
3. IKU “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah”  
Realisasi Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah adalah Rp316.418.550.000,00 atau tercapai 170,53% dari target tahun 2021 sebesar Rp185.546.000.000,00.
4. IKU “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara”  
Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara adalah Rp49.865.570.000,00 atau tercapai 522,54% dari target tahun 2021 sebesar Rp9.543.000.000,00.

5. IKU “Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi”  
Realisasi IKU “Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi” tahun 2021 adalah sebesar 49 (empat puluh sembilan) kegiatan atau tercapai 700,00% dari target sebesar 7 (tujuh) kegiatan.
6. IKU “Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target”  
Realisasi IKU “Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target” tahun 2021 adalah sebesar 9 (sembilan) kegiatan atau tercapai 100,00% dari target sebesar 9 (sembilan) kegiatan.
7. IKU “Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat”  
Realisasi IKU “Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat” tahun 2021 atas kinerja BUMD tahun 2020 adalah sebesar 3 BUMD atau tercapai 100,00% dari target sebanyak 3 BUMD.
8. IKU “Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat”  
Realisasi IKU “Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat” adalah sebanyak 1 BLUD atau tercapai 100,00% dari target sebanyak 1 BLUD. Jumlah BLUD di Provinsi Gorontalo sebanyak 5 BLUD dan sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan evaluasi sebanyak 3 BLUD.
9. IKU “Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan”  
Realisasi IKU “Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan” tahun 2021 adalah sebanyak 26 BUMDes atau 185,71% dari yang ditarget sebanyak 14 BUMDes. Jumlah BUMDes yang ada di Provinsi Gorontalo sebanyak 646 BUMDes yang tersebar di 5 Kabupaten.
10. IKK “Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan”  
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” tahun 2021 adalah sebesar 100,00% atau tercapai 100,00% dari target sebesar 100,00%.
11. IKU “Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan”  
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” tahun 2021 adalah sebesar 85,00% atau tercapai 113,33% dari target sebesar 75,00%.

12. IKU “Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3”

Realisasi IKU “Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3” tahun 2021 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan tujuh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan kapabilitas minimal level 3 APIP dibandingkan dengan tujuh APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

13. IKU “Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3”

Realisasi IKU “Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3” tahun 2020 adalah sebanyak 6 Pemda atau mencapai 85,71% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 7 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan dengan 7 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

14. IKU “Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3”

Realisasi IKU “Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3” tahun 2021 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan terdapat dua Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan MRI minimal Level 3 dibandingkan dengan dua Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi target IKU tahun 2021.

15. IKU “Presentase Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja”

Realisasi IKU “Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja” tahun 2021 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target.

16. IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa”

Realisasi IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” tahun 2021 adalah sebesar 126,69% dengan perhitungan 357 Pemerintah Desa yang telah menyusun LPJ Keuangan desa dibandingkan dengan 296 Pemerintah Desa yang menjadi target dalam IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” tahun 2021.

17. IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes”

Realisasi IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” tahun 2021 adalah sebanyak 1 (satu) Pemda atau mencapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 1 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Siswaskeudes dibandingkan dengan 1 APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi target IKU Tahun 2021.

18. IKU “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai”

Realisasi IKU “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai” sebesar 800%, dengan perhitungan 8 Desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai dibandingkan dengan 1 Desa yang menjadi target dalam IKU “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai” tahun 2021.

19. IKU “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja”

Realisasi IKU “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja” sebesar 86,86 dimana nilai realisasi IKU lebih besar daripada target Perkin tahun 2021 sebesar 75,00, atau mencapai 115,81%.

20. IKU “Skor IKPA Unit Kerja”

Realisasi IKU “Skor IKPA Unit Kerja” adalah 96,42. Hal ini berdasarkan penilaian oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga yang dirilis melalui aplikasi MonevPA, lebih besar daripada target Perkin tahun 2021 sebesar 95,00, atau mencapai 101,49%.

21. IKU “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP”

Realisasi IKU “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP” sebesar 100%. Hal tersebut adalah hasil dilaksanakannya rekonsiliasi internal dengan Biro Keuangan dan Inspektorat atas Laporan Keuangan Tahun 2020, Laporan Semesteran Tahun 2021 dan Laporan Triwulan III

Tahun 2021 serta rekonsiliasi eksternal bulanan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui aplikasi E-Rekon LK, lebih besar dari target Perkin tahun 2021 yaitu sebesar 95 persen, atau mencapai 105,26%.

22. IKU “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja”

Realisasi IKU “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” adalah sebesar 87,12, lebih besar dari target Perkin tahun 2021 sebesar 80, atau mencapai 108,9%.

23. IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja”

Realisasi IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja” tahun 2021 adalah sebesar 105,15% atau melebihi target sebesar 100% dengan skor Nilai SAKIP Unit Kerja sebesar 84,13 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat BPKP.

24. IKU “Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja”

Realisasi IKU “Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja” adalah sebesar 82. Hal ini merupakan hasil dari pengisian kuisioner kepuasan pelayanan Tata Usaha yang diisi oleh seluruh pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan dalam Perkin tahun 2021 sebesar 76, atau tercapai 107,89%.

25. IKU “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja”

Realisasi IKU “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja” adalah sebesar 89,52, lebih besar daripada target Perkin tahun 2021 sebesar 75,00, atau tercapai 107,89%.

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran strategis memerlukan upaya dan kerja keras yang berkesinambungan. Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yaitu melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi.

**KINERJA SASARAN PROGRAM DAN PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2021  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keuangan (Rp000)			SDM (OH)			
							Anggaran (Rp000)	Realisasi (Rp000)	%	Rencana	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Juta	278,00	323,00	116,19							
		Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Juta	463,00	762,00	164,58							
		Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Juta	185546,00	316418,55	170,53							
		Nilai penyelamatan keuangan negara	Juta	9543,00	49865,57	522,54							
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	7,00	49,00	700,00							
		Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	9,00	9,00	100,00							
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	BUMD	3,00	3,00	100,00							
		Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	BLUD	1,00	1,00	100,00							
		Jumlah BUMDes mampu menyusun LK	BUMDes	14,00	26,00	185,71							
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00							
		Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	75,00	85,00	113,33							
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	K/L/Pemda	7,00	7,00	100,00							
		Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	K/L/Pemda	7,00	6,00	85,71							
		Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Pemda Kab/Kota	2,00	2,00	100,00							
		Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja	Pemda	1,00	1,00	100,00							
		Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	Desa	296,00	375,00	126,69							
		Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai	Desa	1,00	8,00	800,00							
		Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1,00	1,00	100,00							

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keuangan (Rp000)			SDM (OH)		
							Anggaran (Rp000)	Realisasi (Rp000)	%	Rencana	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Jumlah Pengawasan							2.873.719.000	2.867.232.760	99,77%	14.092	13.386	95%
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75,00	86,86	115,81						
		Skor IKPA	Skor	95,00	93,79	98,73						
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	95,00	100,00	105,26						
		Nilai Pengelolaan BMN	Nilai	80,00	87,12	108,90						
		Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	80,00	84,13	105,16						
		Persentase Penyelesaian RTP	%	100,00	100,00	100,00						
		Persentase Efektifitas Pengendalian Intern	%	65,00	85,00	130,77						
		Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan	Indeks	76,00	82,00	107,89						
		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks	75,00	89,52	119,36						
Sub Jumlah Dukungan Pengawasan							14.125.775.000	14.117.975.164	99,94%	3.081	3.081	100%
<b>JUMLAH</b>							<b>16.999.494.000</b>	<b>16.985.207.924</b>	<b>99,92%</b>	<b>17.173</b>	<b>16.467</b>	<b>96%</b>

**PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN *OUTCOME* TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020 DAN TARGET 2022  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian		Naik / (Turun)	Realisasi 2021	Target 2024	% realisasi terhadap target 2024
				2020	2021		2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8	11	12	13=11/12*100 %
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Juta	221,00	323,00	102,00	190,52	116,19	(74,33)	323,00	347,00	93,08
		Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Juta	304,00	762,00	458,00	131,60	164,58	32,98	762,00	578,00	131,83
		Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Juta	n/a	316418,55	n/a	n/a	170,53	n/a	316418,55	112930,00	280,19
		Nilai penyelamatan keuangan negara	Juta	62400,00	49865,57	(12.534,43)	230,05	522,54	292,48	49865,57	51.982,00	95,93
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	11,00	49,00	38,00	157,14	700,00	542,86	49,00	7,00	700,00
		Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	n/a	9,00	n/a	157,14	100,00	(57,14)	9,00	7,00	128,57
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	BUMD	1,00	3,00	2,00	133,33	100,00	(33,33)	3,00	5,00	60,00
		Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	BLUD	2,00	1,00	(1,00)	50,00	100,00	50,00	1,00	1,00	100,00
		Jumlah BUMDes mampu menyusun LK	BUMDes	14,00	26,00	12,00	100,00	185,71	85,71	26,00	28,00	92,86
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00
		Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	70,00	85,00	15,00	100,00	113,33	13,33	85,00	90,00	94,44
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	K/L/Pemda	7,00	7,00	-	100,00	100,00	-	7,00	7,00	100,00
		Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	K/L/Pemda	7,00	6,00	(1,00)	100,00	85,71	(14,29)	6,00	7,00	85,71
		Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Pemda Kab/Kota	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	1,00	4,00	25,00
		Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja	Pemda	7,00	1,00	(6,00)	700,00	100,00	(600,00)	1,00	111,00	0,90
		Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	Desa	n/a	375,00	n/a	n/a	126,69	n/a	375,00	59,97	625,31
		Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai	Desa	n/a	8,00	n/a	n/a	800,00	n/a	8,00	130,00	6,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian		Naik / (Turun)	Realisasi 2021	Target 2024	% realisasi terhadap target 2024
				2020	2021		2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8	11	12	13=11/12*100 %
		<i>Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes</i>	APIP	1,00	1,00	-	100,00	100,00	-	1,00	4,00	25,00
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	<i>Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja</i>	Skor	82,07	86,86	4,79	109,43	115,81	6,39	86,86	79,00	109,95
		<i>Skor IKPA Unit Kerja</i>	Skor	97,30	93,79	(3,51)	113,14	98,73	(14,41)	93,79	90,00	104,21
		<i>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP</i>	%	100,00	100,00	-	100,00	105,26	5,26	100,00	100,00	100,00
		<i>Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)</i>	Nilai	85,00	90,00	5,00	100,00	108,90	8,90	90,00	90,00	100,00
		<i>Nilai SAKIP</i>	Skor	84,04	84,13	0,09	105,05	105,16	0,11	84,13	84,00	100,15
		<i>Presentase Penyelesaian RTP</i>	%	n/a	100,00	n/a	n/a	100,00	n/a	100,00	0,00	-
		<i>Presentase Efektifitas Pengendalian Intern</i>	%	n/a	0,85	n/a	n/a	130,77	n/a	0,85	0,00	-
		<i>Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan</i>	Indeks	78,78	82,00	3,22	112,54	107,89	(4,65)	82,00	82,00	100,00
		<i>Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja</i>	Indeks	92,25	89,52	(2,73)	131,79	119,36	(12,43)	89,52	81,00	110,52

\*) n/a = tidak dapat diperbandingkan karena target yang dimaksud tidak ada pada tahun 2020

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/OH (SDM)  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2021**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Dana (Rp000)			SDM (OH)			Penggunaan Dana	Penggunaan SDM/OH
							Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Efisien/ Tidak Efisien	Efisien/ Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat	Laporan	59	59	100,00%	735.071.000	733.115.131	99,73	5.374	5.680	105,69	Efisien	Efisien
2	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Laporan	58	58	100,00%	1.238.203.000	1.237.233.349	99,92	4.518	4.262	94,33	Efisien	Efisien
3	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Akuntan Negara	Laporan	19	19	100,00%	284.256.000	282.652.125	99,44	1.506	1.149	76,29	Efisien	Efisien
4	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Investigasi	Laporan	20	19	95,00%	347.384.000	347.126.077	99,93	1.274	1.197	93,96	Efisien	Efisien
5	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	Laporan	13	13	100,00%	268.805.000	267.106.078	99,37	1.420	1.098	77,32	Efisien	Efisien
<b>JUMLAH SASARAN KEGIATAN PENGAWASAN</b>				<b>169</b>	<b>168</b>	<b>99,408284</b>	<b>2.873.719.000</b>	<b>2.867.232.760</b>	<b>99,77</b>	<b>14.092</b>	<b>13.386</b>	<b>94,99</b>		
6	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	Layanan Perkantoran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Layanan	1	1	100,00	13.262.792.000	13.255.909.355	99,95	2.864	2.864	100,00	Efisien	Efisien
		Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Layanan	1	1	100,00	286.177.000	285.490.909	99,76	60	60	100,00	Efisien	Efisien
		Layanan Sarana Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Layanan	1	1	100,00	257.500.000	257.277.900	99,91	120	120	100,00	Efisien	Efisien
		Layanan Prasarana Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Layanan	1	1	100,00	319.306.000	319.297.000	100,00	240	240	100,00	Efisien	Efisien
<b>JUMLAH SASARAN KEGIATAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA</b>							<b>14.125.775.000</b>	<b>14.117.975.164</b>	<b>99,94</b>	<b>3.081</b>	<b>3.081</b>	<b>100,00</b>		
<b>TOTAL</b>							<b>16.999.494.000</b>	<b>16.985.207.924</b>	<b>99,92</b>	<b>17.173</b>	<b>16.467</b>	<b>95,89</b>		

**PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian		Naik / (Turun)
				2020	2021		2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
1	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat	Laporan	51	59	8	100,00%	100,00%	0,00%
2	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Laporan	59	58	-1	100,00%	100,00%	0,00%
3	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Akuntan Negara	Laporan	21	19	-2	100,00%	100,00%	0,00%
4	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Investigasi	Laporan	21	19	-2	100,00%	100,00%	0,00%
5	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	Laporan	19	13	-6	100,00%	100,00%	0,00%
6	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	Layanan Perkantoran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Layanan	1	1	0	100,00%	100%	0,00%
		Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Layanan	1	1	0	100,00%	100%	0,00%
		Layanan Sarana Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Layanan	1	1	0	100,00%	100%	0,00%
		Layanan Prasarana Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Layanan	n/a*)	1	n/a*)	n/a*)	100%	n/a*)

\*) n/a = tidak dapat diperbandingkan karena output yang dimaksud tidak ada pada tahun 2020

MATURITAS SPIP PEMDA TAHUN 2021  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

No.	Nama Pemda	Skor	Level	Status Terakhir *)		
				Self Assessment	QA Perwakilan	Reviu Rendal
1	2	3	5	6	7	8
1	Provinsi Gorontalo	3,125	3		V	
2	Kota Gorontalo	3,106	3		V	
3	Kabupaten Boalemo	3,000	3		V	
4	Kabupaten Bone Bolango	3,000	3		V	
5	Kabupaten Gorontalo	3,083	3		V	
6	Kabupaten Gorontalo Utara	2,900	2		V	
7	Kabupaten Pohuwato	3,046	3		V	

Keterangan : \*) untuk status terakhir diisi tanda **V** pada kolom (6, 7 atau 8) yang sesuai dengan status level yang disajikan

KAPABILITAS APIP PEMDA TAHUN 2021  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

No.	Nama Pemda	Level	Status Terakhir *)		
			Self Assessment	QA Perwakilan	Reviu Rendal
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Gorontalo	3			V
2	Kota Gorontalo	3			V
3	Kabupaten Gorontalo	3			V
4	Kabupaten Boalemo	3			V
5	Kabupaten Bone Bolango	3			V
6	Kabupaten Gorontalo Utara	3			V
7	Kabupaten Pohuwato	3			V

Keterangan : \*) untuk status terakhir diisi tanda **V** pada kolom (5, 6 atau 7) yang sesuai dengan status level yang disajikan

TINGKAT KESEHATAN BUMD TAHUN 2021  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

No.	Nama PDAM	SKOR	TINGKAT KESEHATAN
1	Kota Gorontalo	2,92	SEHAT
2	Kab. Boalemo	2,68	KURANG SEHAT
3	Kab. Bone Bolango	2,93	SEHAT
4	Kab. Gorontalo	2,83	SEHAT
5	Kab. Pohuwato	2,08	SAKIT
6	Kab. Gorontalo Utara	2,02	SAKIT